

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DI KOTA YOGYAKARTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999**

SKRIPSI

Di susun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Sejarah



Oleh :

Yekti Suskandari

NIM : 951314011

NIRM : 95005112060412001

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN PENDUDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2001

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI

**PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DI KOTA YOGYAKARTA
DALAM PEMILIHAN UMUM 1999**

Oleh :

Yekti Suskandari

NIM : 951314011

NIRM : 950051120604120011

Teiah disetujui oleh:

Pembimbing I



Drs. G. Moedjanto, M.A.

tanggal. 24-10-2001

Pembimbing II



Dra. Lucia Juningsih, M. Hum.

tanggal. 24-10-2001

SKRIPSI

**PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DI KOTA YOGYAKARTA
DALAM PEMILIHAN UMUM 1999**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Yekti Suskandari

NIM : 951314011

NIRM : 950051120604120011

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
Pada Tanggal 29 September 2001
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Ketua Drs. Sutarjo Adisusilo J.R.

Sekretaris Drs. B. Musidi, M.Pd.

Anggota Drs. G. Moedjanto, M.A.

Anggota Dra. Lucia Juningsih, M.Hum.

Anggota Drs. Sutarjo Adisusilo J.R.

Yogyakarta, 29 September 2001
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma

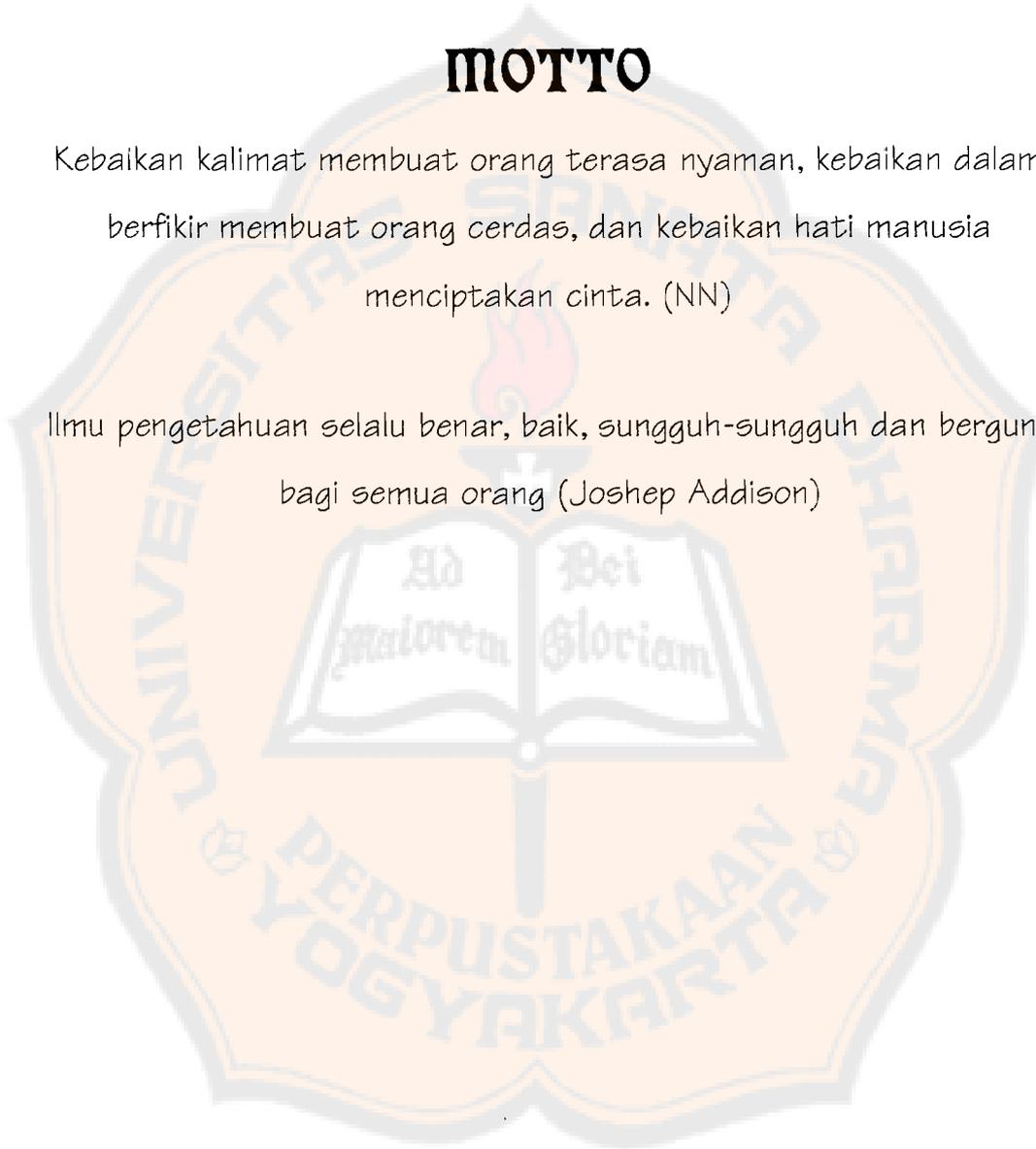
Dekan.

Dr. A. M. Slamet Soewandi, M.Pd.

MOTTO

Kebaikan kalimat membuat orang terasa nyaman, kebaikan dalam berfikir membuat orang cerdas, dan kebaikan hati manusia menciptakan cinta. (NN)

Ilmu pengetahuan selalu benar, baik, sungguh-sungguh dan berguna bagi semua orang (Joshep Addison)



Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- *Kedua orangtuaku yang telah memberikan dukungan baik materi maupun spirit dalam belajar.*
- *Nia, Pita dan Joan.*
- *Teman-teman angkatan'95 Pendidikan Sejarah USD.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

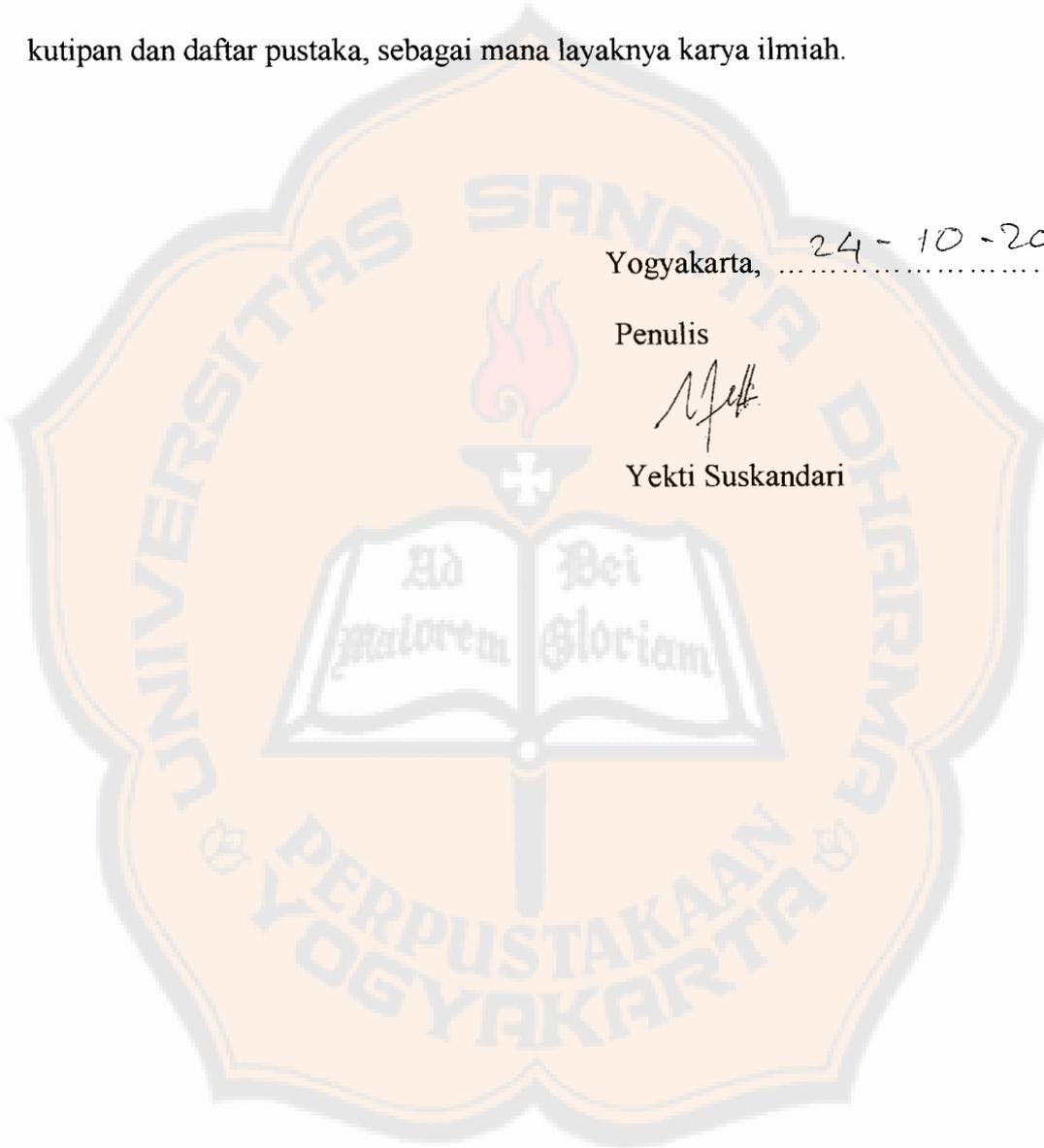
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagai mana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 24-10-2001

Penulis



Yekti Suskandari



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PRAKATA

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam meraih gelar sarjana pendidikan dalam bidang Pendidikan Sejarah.

Keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini disamping usaha dari penulis, juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Atas bantuan tersebut, penulis menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih, terutama kepada Yang terhormat:

1. Bapak G. Moedjanto, M.A., yang telah sudi memberi bimbingan dan mengoreksi skripsi ini.
2. Ibu Lucia Juningsih, M.Hum., yang telah membimbing dan mendampingi penulis dalam menyusun skripsi.
3. Staf Karyawan Perpustakaan Universitas Sanata Dharma.
4. Bapak Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.
5. Bapak Sekertaris II DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.
6. Anggota DPRD II Kota Yogyakarta Fraksi PDI Perjuangan.
7. Bapak Kepala dan Staf Karyayan Sospol Kota Yogyakarta.
8. Keluarga mbak Asti, yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis di dalam mencari bahan-bahan untuk penyusunan skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu penulis dengan senang hati bersedia menerima sumbangan berupa pemikiran, saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna bagi para pecinta sejarah.

Yogyakarta,.....

Penulis





DAFTAR ISI

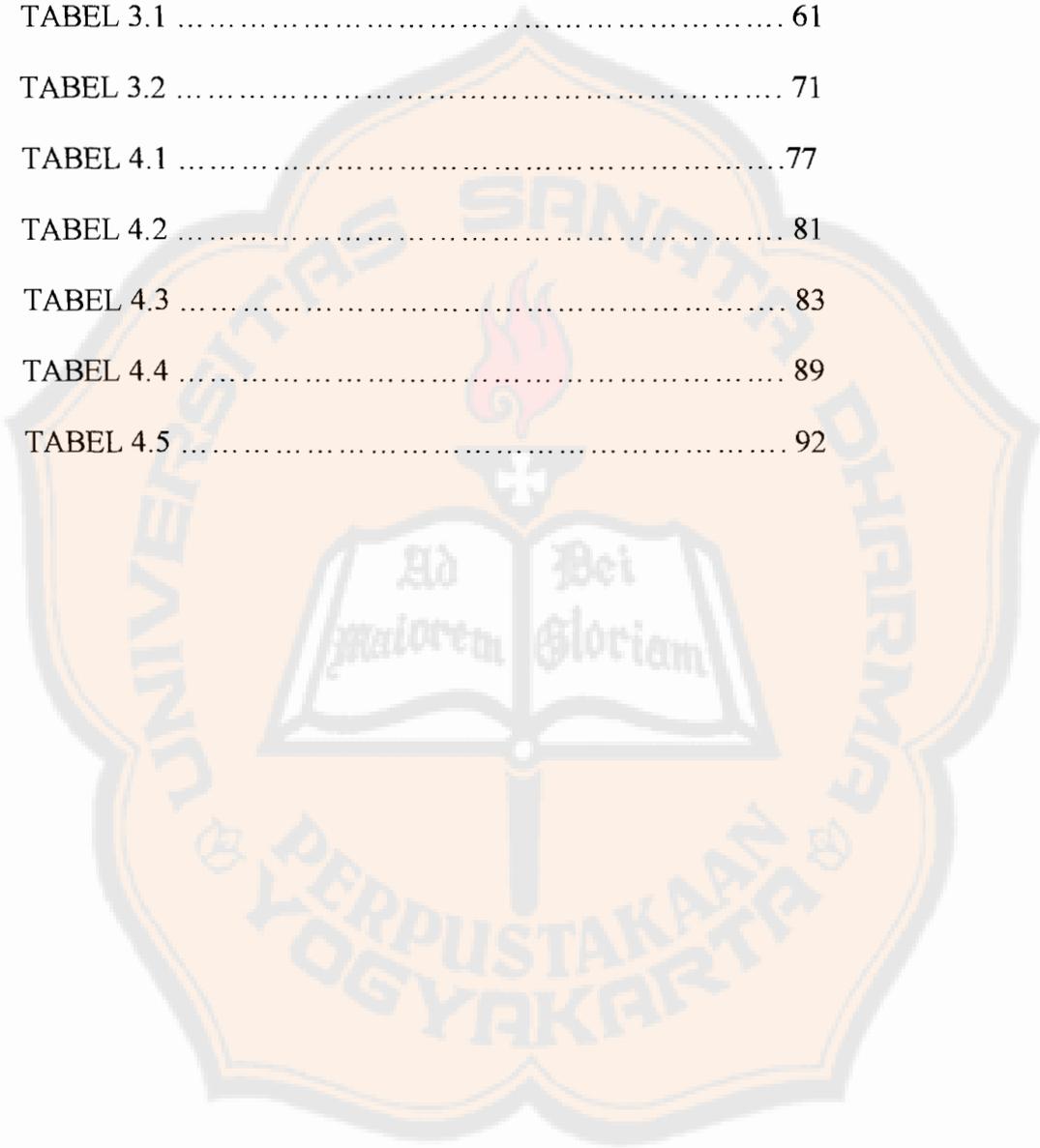
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KEASLIAN KARYA.....	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penulisan	6
E. Kerangka Konseptual dan Pendekatan	7
F. Tinjauan Sumber	15
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	20

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II SEJARAH BERDIRINYA PDI PERJUANGAN KOTA YOGYAKARTA.....	23
A. Perkembangan PDI hingga terjadinya Perpecahan dalam tubuh PDI Pasca Pelaksanaan Kongres Medan	23
B. Terbentuknya PDI Perjuangan di Tingkat Pusat	37
C. Terbentuknya PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta	41
1. Situasi Sebelum Pelaksanaan Kongres Bali	41
2. Situasi Setelah Pelaksanaan Kongres Bali	50
BAB III PDI PERJUANGAN DI KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM 1999	55
A. Persiapan PDI Perjuangan Dalam Menghadapi Pemilihan Umum	55
B. Pelaksanaan Pemilihan Umum 1999 di Kota Yogyakarta	58
C. Hasil Pemilihan Umum 1999 di Kota Yogyakarta	61
BAB IV KEMENANGAN PDI PERJUANGAN DI KOTA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN PEMILU 1999	75
A. Faktor-faktor Pendukung Kemenangan PDI Perjuangan	75
B. Faktor-faktor Penghambat Kemenangan PDI Perjuangan	96
BAB V SIMPULAN	97
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	47
TABEL 3.1	61
TABEL 3.2	71
TABEL 4.1	77
TABEL 4.2	81
TABEL 4.3	83
TABEL 4.4	89
TABEL 4.5	92



ABSTRAK

Skripsi yang berjudul PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 1999, ini ditulis untuk menjawab tiga permasalahan pokok, yaitu: (1) Bagaimana Sejarah Terbentuknya PDI Perjuangan Kota Yogyakarta? (2) Bagaimana PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dalam pemilu 1999? (3) Mengapa PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan Pemilu 1999 menang? Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: (1) Menjelaskan sejarah terbentuknya PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta dalam pemilu 1999. (2) Menjelaskan PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta dalam pemilu 1999. (3) Menjelaskan kemenangan PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta dalam pemilu 1999.

Penulisan PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta dalam pemilu 1999, menggunakan metode sejarah. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan sosial politik. Langkah-langkah dalam metode sejarah, adalah: heuristik, kritik sumber, interpretasi dan penulisan.

Hasil penelitian ini secara garis besar adalah: *pertama*, PDI Perjuangan adalah salah satu partai politik yang terbentuk akibat terjadinya konflik dalam tubuh PDI yang memuncak setelah pelaksanaan Kongres Medan pada masa pemerintahan Orde Baru. Pelaksanaan Kongres Medan mengakibatkan PDI pecah menjadi dua kubu, yakni; kubu PDI Kongres Medan yang diakui oleh pemerintah dan kubu PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri. Setelah terjadi pergantian kekuasaan dari Soeharto ke B.J. Habibie, PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri bisa menyelenggarakan Kongres di Bali pada tanggal 8 Oktober 1998, yang berhasil mengeluarkan keputusan penting, antara lain; perubahan nama partai pimpinan Megawati Soekarnoputri, yakni dari PDI menjadi PDI Perjuangan, yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 14 Februari 1999. Setelah PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri di tingkat pusat, melakukan peresmian pada tanggal 14 Februari 1999, DPC PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri di Kota Yogyakarta kemudian meresmikan nama dan lambang PDI Perjuangan pada tanggal 20 Februari 1999.

Kedua, menjelang pelaksanaan pemilihan umum 1999, PDI Perjuangan Kota Yogyakarta telah mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, seperti; penyusunan program kerja partai, kaderisasi, pemilihan juru bicara kampanye, pemilihan isu-isu yang akan di kemukakan dalam kampanye, pemasangan pamflet dan umbul-umbul, dengan adanya persiapan yang matang tersebut, maka PDI Perjuangan Kota Yogyakarta pada pemilihan umum tahun 1999 bisa memperoleh suara terbanyak.

Ketiga, faktor-faktor yang mendukung kemenangan PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan Pemilu 1999, antara lain: keadaan geografis dan status Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar, kondisi sosial masyarakat, keadaan politik Kota Yogyakarta, keadaan ekonomi masyarakat kota Yogyakarta pada tahun 1999, strategi kampanye dan figur Megawati Soekarnoputri. Faktor yang menghambat kemenangan PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta dalam

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pelaksanaan Pemilu 1999, antara lain: selain sebagai basis PDI Perjuangan Kota Yogyakarta juga dikenal sebagai basis PAN. Menejemen partai lemah karena kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas.



ABSTRACT

This thesis is discussed about the rule PDI Perjuangan in the general election in 1999 in Yogyakarta town. This thesis is aimed at answering three sets of problem: (1) How is the story of the birth PDI Perjuangan in Yogyakarta town? (2) How is PDI Perjuangan in the Yogyakarta town at the 1999 general election? (3) Why PDI Perjuangan in the Yogyakarta town get a win in 1999 general election? The purpose from this thesis, are: (1) To explain about PDI Perjuangan story built. (2) To explain about PDI Perjuangan in the general election 1999 in Yogyakarta town. (3) To explain about the winner PDI Perjuangan in the general election 1999 in Yogyakarta town.

This thesis use history method for written about PDI Perjuangan in the general election 1999 in Yogyakarta town, the focus in social politic. This method thesis use compas four phases, is: heuristic, source critic, interpretation, and written.

The result of thesis globally explain the condition is: *first*, PDI Perjuangan is ones party politic happen from the conflict between Megawati's PDI and Suryadi's PDI. PDI was broken in the congress of Medan and become two group, there are Suryadi's and Megawati's PDI. After the variation of power from Soeharto to B.J. Habibie has happened. Megawati's PDI can to manage the congress of Bali in October 1998, and their's an important result. That the name of Megawati's party is PDI Perjuangan.

Second, before to do accomplishment general election, PDI Perjuangan, at Yogyakarta town, prepared unrivaled kinds interlaced, such as; work job of party, native speakers, and to choose the new isu, to light poster, flag, with a good preparing before general elected, of course PDI Perjuangan get a winner in the general elected. *Third*, factor can make PDI Perjuangan get a win in the general election is: condition of geographic and status Yogyakarta as a study location, social condition of public, situation of politic, and condition of social economic, strategic of interlaced, and the figure of Megawati Soekarnoputri.. The real fact can make PDI Perjuangan get the win in the general election is Yogyakarta town had strategic area, beside that Yogyakarta is central place for study, the town of tourist, and the town of culture. There were many new idea about the democratic, and we can saw from the general election that PDI Perjuangan get the win. There were many people who work in trade sector, industry, service sector, choose PDI Perjuangan in the general election, because they expect PDI Perjuangan can be winner and make a change in their life.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap lima tahun sekali bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum. Pada era reformasi atau pasca pemerintahan Orde Baru pemilihan umum dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999. Pelaksanaan pemilihan umum tahun 1999 berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.¹

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk membentuk suatu sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan oleh rakyat, menurut sistem kekuasaan negara yang benar-benar memancarkan sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan perwakilan.² Pada tahun 1999 bangsa Indonesia mengadakan pemilihan umum, yang diikuti oleh 48 Partai Politik.

Salah satu dari ke-48 partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999, sekaligus sebagai partai politik pemenang pemilu baik di tingkat pusat, Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun di Daerah Tingkat II Kota

¹ *Dokumen Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kota Yogyakarta.*

² M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991, hlm.2.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Yogyakarta, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau lebih dikenal dengan nama PDI Perjuangan.

PDI Perjuangan merupakan partai politik yang dibentuk akibat adanya konflik yang terjadi dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada masa pemerintahan Orde Baru, yang memuncak setelah pelaksanaan Kongres Medan pada tahun 1996. Konflik yang terjadi di dalam tubuh PDI, mengakibatkan terjadinya perpecahan dalam tubuh PDI menjadi dua kubu, yakni kubu PDI hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) di Jakarta pada tahun 1993 yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, yang dalam pelaksanaan pemilihan Umum 1999 menggunakan nama PDI Perjuangan, dan PDI hasil Kongres Medan yang dipimpin oleh Suryadi. Susunan Struktur Organisasi Pengurus PDI hasil Kongres Medan, merupakan hasil dari susunan pengurus PDI yang ditetapkan berdasarkan hasil dari pelaksanaan Kongres di Medan pada tanggal 20-22 Juni 1996, yang mendapat dukungan dari pemerintah orde baru dan diakui serta ditetapkan oleh pemerintah orde baru sebagai susunan dari struktur pengurus organisasi PDI yang sah, dan dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 1999 tetap menggunakan nama PDI.³

Para pengamat politik berpendapat bahwa rekayasa pelaksanaan kongres Medan, merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggusur kedudukan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI yang dianggap bisa membahayakan eksistensi pemerintah Orde Baru. Pemerintah Orde Baru khawatir jika Megawati Soekarnoputri tetap menjadi Ketua Umum PDI pada

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pelaksanaan pemilu 1997, kekuatan PDI akan menyaingi atau bahkan melebihi kekuatan Golkar. Kekawatiran pemerintah Orde Baru terhadap kekuatan PDI, muncul setelah melihat peningkatan perolehan jumlah suara yang dialami oleh PDI, semenjak Megawati Soekarnoputri mulai aktif bergabung dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1987-1992.⁴

Peningkatan perolehan suara PDI pada pemilu 1987 sebanyak 10,8 % dan 1992 14,90 %, memang membuat pemerintah khawatir akan eksistensinya, tetapi pemerintah lebih khawatir ketika Megawati Soekarnoputri akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI pada pelaksanaan MUNAS di Jakarta pada tahun 1993, yang membuat pemerintah khawatir akan eksistensinya. Untuk menghambat perkembangan PDI, maka menjelang pelaksanaan pemilu 1997 tepatnya pada bulan Juni 1996 pemerintah merekayasa pelaksanaan Kongres di Medan yang akhirnya mengangkat Suryadi sebagai Ketua Umum DPP PDI, dengan tujuan agar PDI hancur dan dalam pelaksanaan pemilu 1997 tidak mungkin menandingi jumlah perolehan suara Golkar.⁵ Setelah Suryadi diangkat menjadi Ketua Umum DPP PDI hasil Kongres Medan, dengan bantuan aparat keamanan Suryadi berusaha merebut kantor DPP PDI yang pada saat itu masih dikuasai oleh para pendukung setia Megawati Soekarnoputri. Peristiwa perebutan kantor DPP PDI tersebut kemudian dikenal dengan nama peristiwa 27 Juli 1996.⁶

³ Veven Wardhana, *Kemelut PDI di Layar Televisi*, Jakarta: Studi Arus Informasi, 1997, hlm. 20.

⁴ *Ibid.*

⁵ Eep Syaifullah Fatah, *Bangsa Saya Yang Menyebarkan*. Bandung: PT Remaja, 1998, hlm.28.

⁶ YLBHI, *1996 Tahun Kekerasan Potret Pelanggaran HAM di Indonesia*. YLBHI, 1997, hlm. 1-8.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pada tanggal 21 Mei 1998 terjadi perubahan politik di Indonesia yang ditandai dengan pengunduran diri Soeharto dari jabatan Presiden RI, karena adanya desakan dari rakyat sebagai akibat dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dan digantikan oleh B.J. Habibie. Pemerintahan B.J. Habibie yang merupakan pemerintahan masa transisi, atas desakan dari rakyat akhirnya mengagendakan pelaksanaan pemilu pada tanggal 7 Juni 1999. Langkah awal yang ditempuh oleh Habibie untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu 1999, yakni dengan membuka kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk membentuk partai politik dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu.

Pada pelaksanaan pemilu 1999 yang diikuti oleh 48 partai ternyata dimenangkan oleh PDI Perjuangan (PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri, yang setelah pelaksanaan kongres di Bali 1998, kemudian menggunakan nama PDI Perjuangan), baik ditingkat Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun ditingkat Pusat. Kemenangan yang diperoleh oleh PDI Perjuangan dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 1999 ini dinilai oleh para pengamat politik sebagai suatu hal yang wajar, sebab partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri pada masa pemerintahan Orde Baru banyak mendapat tekanan dari pemerintah. Wajar jika pada pelaksanaan pemilihan umum 1999 banyak anggota masyarakat yang bersimpati terhadap PDI perjuangan, sehingga dapat menaikkan jumlah perolehan suara PDI Perjuangan pada pemilihan umum 1999, dan berhasil mengalahkan empat partai besar lainnya, yakni: PKB, Golkar PPP dan PAN.

PDI Perjuangan memang telah banyak dibahas dalam penulisan skripsi, namun dalam penulisan skripsi tersebut yang dibahas tentang Sejarah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terbentuknya PDI Perjuangan di tingkat Pusat, dan kemenangan PDI Perjuangan dalam pemilihan umum dari segi perolehan kursi di DPRD Tingkat II Kota Yogyakarta dan pengaruh kemenangan PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta dalam kebijaksanaan pengambilan keputusan pemerintah. Alasan dari pemilihan judul skripsi PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta dalam pemilihan umum tahun 1999, karena PDI Perjuangan merupakan Partai pemenang pemilihan umum dan Kota Yogyakarta merupakan basis dari PDI Perjuangan, disamping itu PDI Perjuangan merupakan salah satu Parpol yang berusaha menegakkan nilai-nilai demokrasi yang pada masa pemerintahan Orde Baru terkesan diabaikan.

B. Rumusan Permasalahan

Setelah diuraikan tentang latar belakang PDI Perjuangan sebelum pelaksanaan pemilihan umum tahun 1999, maka akan diuraikan beberapa pertanyaan. Uraian pertanyaan ini nantinya diharapkan mampu menjelaskan tulisan mengenai PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Umum tahun 1999. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sejarah terbentuknya PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan Pemilu 1999?
3. Mengapa PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta menang dalam Pemilu 1999?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Umum tahun 1999, yaitu:

1. Menjelaskan sejarah terbentuknya PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.
2. Menjelaskan PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan Pemilu 1999.
3. Menjelaskan kemenangan PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dalam Pemilu tahun 1999.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta dalam pemilihan umum tahun 1999, yaitu:

1. Bagi ilmu Sejarah untuk memperkaya khasanah penulisan sejarah politik di Indonesia pada umumnya dan di Kota Yogyakarta pada khususnya, karena selama pemerintahan orde baru penulisan sejarah politik selalu didominasi oleh partai milik pemerintah.
2. Bagi PDI Perjuangan tulisan ini berguna sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menghadapi pemilihan umum 2004.

E. Kerangka Konseptual dan Pendekatan

Dalam penulisan mengenai PDI perjuangan di Kota Yogyakarta dalam pemilihan umum tahun 1999 diperlukan pemahaman tentang beberapa konsep dari demokrasi, partai politik, pemilihan umum, dan PDI Perjuangan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos*, yang artinya rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan, demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan ada ditangan rakyat. Perumusan yang paling umum mengenai demokrasi adalah suatu keputusan politik yang diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat melalui proses pemilihan yang bebas.⁷

Menurut Megawati Soekarnoputri konsep demokrasi yang harus dikembangkan di Indonesia adalah demokrasi pancasila, yakni sebuah demokrasi yang merupakan penjabaran langsung dari sila-sila Pancasila. Ciri demokrasi adalah jiwa besar dalam menerima perbedaan pendapat dan kritik. Kesepakatan dan keputusan yang diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Demokrasi yang diperjuangkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang komplit, yaitu demokrasi pancasila yang dalam kehidupan berpolitik juga terkandung demokrasi ekonomi, demokrasi sosial dan demokrasi kebudayaan.⁸

Menurut Miriam Budiardjo partai politik berarti suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini yakni untuk memperoleh suatu kekuasaan politik dan melalui kekuasaan politik tersebut, mereka berusaha melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang telah direncanakan.⁹

Pembentukan partai Politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak dari warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia, 1977, hlm. 69.

⁸ Megawati Soekarnoputri, *Pokok-Pokok Pikiran Megawati Soekarnoputri, Bendera Sudah Saya Kibarkan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 19-21.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pendapat sesuai dengan pasal 28 UUD 1945. Melalui partai politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat di dalam arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Keragaman pendapat yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat tersebut menumbuhkan rasa keinginan dalam diri masyarakat untuk mendirikan partai politik. Dengan demikian pada hakekatnya menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, negara tidak membatasi jumlah partai politik yang dibentuk oleh rakyat.¹⁰

Setiap partai politik mempunyai kedudukan, fungsi, hak, dan kewajiban yang sama dan sederajat. Kedaulatan partai politik ada ditangan anggotanya, maka partai politik pada dasarnya bersifat mandiri dalam mengatur organisasinya. Oleh karena itu pihak-pihak yang berada di luar struktur organisasi partai tidak dibenarkan untuk ikut campur tangan dalam hal pengelolaan organisasi partai politik.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 pasal 2 ayat 1 Setiap partai politik yang dibentuk hendaknya mencantumkan Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam anggaran partai dan asas atau ciri partai, aspirasi dan program partai tidak bertentangan dengan Pancasila.¹¹ Aspirasi dan program dari partai politik merupakan hasil dari pengejawantahan dari asas atau ciri dari suatu partai politik dalam upaya memecahkan masalah bangsa Indonesia. Program tersebut yang kemudian diarahkan guna mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia dan mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila sebagai

⁹ Miriam Budiardjo, *Partisipasi Partai Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1982, hlm. 14.

¹⁰ Redaksi Sinar Grafika, *Tiga Undang-Undang Politik 1999*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 1999, hlm 13-15.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tujuan umum dan memperjuangkan cita-cita dari para anggota partai politik sebagai tujuan khusus.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 1 Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk melaksanakan politik dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan bernegara. Disamping itu partai politik juga berfungsi sebagai tempat penyaluran aspirasi rakyat, menyalurkan kepentingan rakyat dalam pembuatan kebijaksanaan negara serta membina dan mempersiapkan masyarakat untuk mengisi jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 2 Partai Politik merupakan salah satu wahana guna menyatakan suatu dukungan dan tuntutan dalam proses politik. Semua fungsi dari partai politik dapat diwujudkan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis, jujur, umum, langsung, bebas dan rahasia.¹³

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan negara yang ingin di wujudkan melalui pemilihan umum adalah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan dan diabdikan intuk kepentingan rakyat.

Di Indonesia pemilihan umum baru saja dilaksanakan tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999. Pemilihan umum yang dilaksanakan pada era reformasi dan diikuti oleh 48 partai politik dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan

¹¹ *Ibid.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan kedudukan dari MPR, DPR, dan DPRD.

Menurut M. Rusli Karim pemilihan umum pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak politik rakyat untuk menjalankan suatu pemerintahan. Tujuan dari pemilihan umum adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat, sedangkan kedudukan dari wakil-wakil rakyat ini merupakan simbol dari demokrasi dan kedaulatan rakyat.¹⁴

Pengertian pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Pasal , yaitu:

1. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Pemilihan Umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil dengan mengadakan pengadaan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
3. Pemilihan Umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ M. Rusli Karim, *Pemilihan Umum Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992, hlm.2.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Pemilihan Umum dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang selanjutnya disebut DPR, DPRD I, dan DPRD II, kecuali untuk anggota DPR, DPRD II dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
5. Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud ayat (4) juga untuk mengisi keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang selanjutnya disebut MPR.
6. Pemberian suara dalam Pemilihan Umum adalah hak setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih.
7. Pemilihan Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar.¹⁵

Tujuan dari pelaksanaan pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, yakni untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum, bahwa pemilihan umum

¹⁵ Redaksi Sinar Grafika, *op.cit.*, hlm. 27-28.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

diselenggarakan secara demokratis dan transparan, berdasarkan asas jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.

Dalam praktek penyelenggaraan pemilihan umum Indonesia menggunakan sistem proporsional dengan stelsel daftar. Untuk lebih memperjelas tentang sistem pemilihan umum yang digunakan di Indonesia, dibawah ini dijabarkan tentang sistem pemilihan umum yang digunakan di Indonesia berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen Panitia Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Yogyakarta, yakni:

1. sistem pemilihan umum yang digunakan di Indonesia adalah sistem proporsional dengan stelsel daftar.
2. Besarnya perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD sejauh mungkin berimbang berdasarkan dukungan pemilih.
3. Partai politik mendapatkan jumlah kursi berdasarkan pada hitungan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP).
4. Tiap-tiap Daerah Tingkat II mendapatkan minimal satu orang wakil untuk keanggotaan DPR.¹⁶

PDI Perjuangan adalah partai yang dibentuk akibat adanya konflik *intern* pemimpin partai, yang ada dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada masa pemerintahan orde Baru, akibat intervensi pemerintah orde baru yang memuncak setelah pelaksanaan Kongres di Medan pada tanggal 20-22 Juni 1996, yang kemudian pecah menjadi dua kubu yakni PDI Hasil Musyawarah Nasional

¹⁶ *Dokumen Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kota Yogyakarta.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(MUNAS) yang dipimpin oleh Megawati SoekarnoPutri, yang dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 1999 menggunakan nama PDI Perjuangan, dan PDI hasil Kongres Medan yang dipimpin oleh Suryadi.¹⁷

Perpecahan dalam tubuh PDI disinyalir oleh berbagai pihak merupakan upaya pemerintah untuk meredam kekuatan dari PDI, karena adanya ketakutan dari pihak Pemerintah Orde Baru akan kekuatan PDI semenjak bergabungnya Megawati Soekarnoputri dalam struktur organisasi PDI. Kekawatiran terhadap kelangsungan eksistensi pemerintah Orde Baru inilah yang kemudian mendorong pemerintah merekayasa pelaksanaan kongres Medan.¹⁸

Setelah terjadi pergantian kekuasaan dari Soeharto ke B.J. Habibie, PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri akhirnya bisa melaksanakan Kongres di Bali pada tanggal 8-10 Oktober 1998. Pada pelaksanaan Kongres tersebut, PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri mengubah nama partai menjadi PDI Perjuangan. Kata Perjuangan yang menyertai nama PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri, menggambarkan sebuah proses perjuangan yang panjang dari partai pimpinan Megawati Soekarnoputri dari tahun 1996 – 1998 dalam rangka menegakkan demokrasi dan hukum di Indonesia, yang pada masa pemerintahan Orde Baru tersekan diabaikan, dan menggambarkan upaya yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam rangka mempertahankan eksistensinya dan berjuang untuk menghadapi berbagai tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.¹⁹

¹⁷ Veven Wardana, *op.cit.*, hlm. 20.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Dokumen PDI Perjuangan tentang Evaluasi Hasil Akhir Tahun 1999 dan Prospeknya Memasuki Eka Dasa Warsa.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Perjuangan dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia tercermin dalam program-program dari PDI Perjuangan, antara lain; mengusahakan pelaksanaan pemilu 1999, yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil, mengusahakan agar pemerintahan yang bersih dari unsur KKN, dan berusaha untuk mensejahterakan rakyat.²⁰

Cita-cita dari PDI Perjuangan dapat diwujudkan melalui tahapan-tahapan pemilu di Indonesia, yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999. Cita-cita dari PDI Perjuangan dapat terwujud jika dalam pelaksanaan pemilu 1999 PDI Perjuangan memperoleh suara terbanyak, oleh karena itu PDI Perjuangan berusaha mensosialisasikan program-programnya pada pelaksanaan kampanye supaya masyarakat memilih PDI Perjuangan dalam pelaksanaan pemilu.

Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya PDI Perjuangan bisa memperoleh kemenangan pada pelaksanaan pemilu 1999, baik di tingkat Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun di tingkat Pusat. Kemenangan yang diperoleh PDI Perjuangan pada pelaksanaan pemilu 1999, berkat kerja keras dari para pengurus maupun kader PDI Perjuangan pada saat mempersiapkan pelaksanaan pemilu.

Penulisan mengenai PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Umum 1999 termasuk dalam sejarah lokal yang menitik beratkan pada sejarah sosial politik. Pendekatan sosial yang digunakan untuk melihat status sosial para pendukung PDI Perjuangan dilihat dari jenis kelamin, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Pendekatan politik digunakan untuk menjelaskan

²⁰ *Wawancara dengan Nuryadi, Anggota DPRD II Kota Yogyakarta Fraksi PDI P, 20 Pebruari 2001.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tentang berbagai persiapan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dalam menghadapi pemilihan umum 1999, dan melihat lebih dekat tentang konsep kepemimpinan, yang menyangkut distribusi kekuasaan, kebijaksanaan politik dan program-program politik yang telah direncanakan.

F. Tinjauan Sumber

Beberapa sumber tertulis yang digunakan dalam skripsi ini, antara lain:

Pertama, *ADART PDI Perjuangan Kota Yogyakarta tahun 1996-2000*, yang berisi tentang hal-hal yang menyangkut tentang peraturan-peraturan partai. Dokumen ini digunakan untuk membahas Sejarah Terbentuknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta.

Kedua, *Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 1996-2000*, yang berisi tentang laporan pertanggung jawaban dari para pengurus Dewan Pimpinan Daerah Istimewa Yogyakarta PDI Perjuangan Masa bakti 1996- 2000, selama menjabat sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 1996-2000. Dokumen ini digunakan untuk membahas Sejarah Terbentuknya PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.

Ketiga, *Dokumen hasil Dari Konfrensi Cabang PDI 1996*, yang berisi tentang susunan pengurus DPC PDI kota Yogyakarta 1996-2000. Dokumen ini digunakan untuk membahas Sejarah Terbentuknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Keempat, *Dokumen Kumpulan Pidato Megawati Soekarno Putri dari tahun 1996-2000*, berisi tentang pernyataan sikap politik yang dikemukakan oleh Megawati Soekarnoputri menanggapi situasi politik yang terjadi di Indonesia. Dokumen ini digunakan untuk membahas Sejarah Terbentuknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta.

Kelima, *Dokumen Pelaksanaan Kongres di Bali 1998*, yang berisi tentang rencana program dan strategi PDI Perjuangan dalam menghadapi Pemilihan Umum 1999. Dokumen ini digunakan untuk membahas Sejarah Terbentuknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta dan Kemenangan PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Dalam Pemilu 1999.

Keenam, *Dokumen Panitia Pemilihan Umum Daerah Tingkat II Kota Yogyakarta tentang data Perolehan Suara Pemilihan Umum 1999*. Dokumen ini digunakan untuk membahas hasil perolehan suara Pemilu 1999, dan untuk mengetahui kemenangan PDI Perjuangan dalam pelaksanaan Pemilu 1999 di Kota Yogyakarta.

Ketujuh, *Megawati Soekarnoputri Biografi Politik*. Ditulis oleh Achmad Bahar dan diterbitkan oleh PT Pena Cendekia tahun 1996. Buku ini berisi tentang perjalanan karir politik Megawati Soekarnoputri, dan digunakan untuk membahas perjalanan karir Megawati Soekarnoputri di PDI dan konflik-konflik yang terjadi di tubuh PDI.

Kedelapan, *KOMNAS HAM, Catatan wartawan*. Ditulis oleh A.A Sudirman Achmadi dan diterbitkan oleh Forum Akal Sehat dan INPI tahun 1999. Buku ini berisi tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan pada masa

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pemerintahan Orde Baru. Buku ini digunakan untuk membahas tentang berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru, terutama yang berhubungan dengan peristiwa 27 Juli 1996.

Kesembilan, *Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 1999*. Disusun oleh BPS Kota Yogyakarta. Buku ini berisi tentang kondisi Kota Yogyakarta selama tahun 1999, dilihat dari segi keadaan geografis, kondisi sosial, kondisi sosial politik dan kondisi sosial ekonomi masyarakat kota Yogyakarta. Buku ini dipergunakan untuk membahas tentang keadaan geografis, kondisi sosial, keadaan politik, dan keadaan sosial masyarakat Kota Yogyakarta, kaitannya dengan kemenangan PDI P dalam pelaksanaan pemilu 1999 di Kota Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk menulis PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Umum tahun 1999 menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.²¹ Langkah-langkah dalam metode sejarah adalah sebagai berikut:

1. Heuristik

Sumber yang digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan diatas diperoleh melalui sumber lisan dan tertulis. Sumber lisan diperoleh melalui wawancara dengan nara sumber yang berjumlah 8 orang, antara lain; wawancara dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Ketua PDI Perjuangan

²¹ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*. Universitas Indonesia, 1986, hlm.32.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kota Yogyakarta, Sekertaris PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Bendahara PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Anggota-anggota DPRD II Kota Yogyakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, kader PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dan dengan simpatisan PDI Perjuangan Kota Yogyakarta. Sumber tertulis dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen dokumen tentang PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, beberapa arsip tentang Pemilihan Umum tahun 1999 di Kota Yogyakarta, dokumen tentang situasi Kota Yogyakarta pada tahun 1999 tentang kondisi geografis, sosial politik dan sosial ekonomi dari masyarakat kota Yogyakarta, buku-buku yang membahas tentang partai politik dan buku-buku yang membahas tentang peristiwa 27 Juli 1996.

2. *Kritik sumber*

Setelah memperoleh data yang dikumpulkan dari DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, maka selanjutnya melakukan kritik sumber. Kritik sumber dilakukan dengan cara membandingkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ketua, dan para pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, anggota DPRD II Kota Yogyakarta Fraksi PDI Perjuangan dan para kader PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, dan data dokumen tentang PDI Perjuangan.

Tujuan kritik sumber adalah untuk mengetahui kebenaran dan keaslian sumber. Untuk mengetahui informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan buku dilakukan metode perbandingan. Metode ini digunakan untuk membandingkan suatu informasi dengan informasi yang lainnya. Kesamaan informasi dari berbagai sumber dipandang cukup layak untuk dinyatakan bahwa

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

informasi itu benar, dan dari data dokumen tentang PDI Perjuangan dan pemilu 1999 dengan kenyataan dilapangan kemudian data-data yang telah diperoleh tersebut diuji kebenarannya.

Penelitian ini membandingkan pernyataan baik sumber primer maupun sumber sekunder. Perbandingan tersebut dilakukan dengan cara tertutup dan terbuka. Perbandingan tertutup artinya, antara sumber primer dan sekunder tidak mengetahui bahwa pernyataannya akan saling diuji. Langkah ini ditempuh agar informan bisa lebih leluasa dalam memberikan keterangan. Perbandingan cara terbuka artinya, antara sumber primer dan sekunder mengetahui bahwa pernyataannya akan saling diuji.

3. *Interpretasi*

Kebenaran dan keaslian sumber dipandang telah terjamin, maka kemudian dilakukan interpretasi. Interpretasi ini dilakukan dengan jalan mengolah data yang diperoleh dengan cara cermat. Fakta-fakta sejarah yang telah dikumpulkan perlu dihubung-hubungkan dan dikaitkan satu sama lainnya sebagai suatu rangkaian peristiwa yang masuk akal.

Fakta-fakta yang dikumpulkan merupakan bagian kecil dari suatu peristiwa atau kegiatan yang dilakukan informan. Bagian-bagian kecil itulah yang akan menghasilkan rangkaian peristiwa yang akan diteliti. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dapat memenangkan perolehan suara dalam pelaksanaan pemilu 1999, karena adanya fakta. Fakta itu antara lain, adalah: keadaan geografis dan status Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar, keadaan sosial ekonomi masyarakat Kota

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Yogyakarta tahun 1999, kondisi politik Kota Yogyakarta menjelang pelaksanaan pemilu 1999, persiapan dan strategi kampanye yang diterapkan oleh DPC PDI Perjuangan, dan figur Megawati Soekarnoputri yang dianggap sebagai simbol perlawanan rakyat melawan pemerintahan Orde baru.

4. *Penulisan*

Penulisan sejarah tidak terlepas dari sumber sejarah yang terkait didalamnya, yang memberikan suatu gambaran mengenai rangkaian suatu peristiwa. Dalam penulisan sejarah aspek kronologis dan sistematis suatu peristiwa sangat penting. Kronologis dan sistematis ini sangat mudah memberikan suatu pengertian dasar kapan suatu peristiwa itu terjadi.

Dalam penulisan PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 1999, aspek kronologisnya nampak pada tahun 1993-1999. Pada tahun 1993 Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi Ketua DPP PDI. Pada tahun 1996 adanya pelaksanaan Kongres Medan yang diprakarsai oleh Fatimah Achmad dan didukung oleh pemerintah, yang akhirnya membuat PDI pecah menjadi dua yakni; PDI Hasil Kongres Medan dan PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri, dan disusul dengan adanya peristiwa 27 Juli 1997.

Pada tahun 1998, setelah terjadi pergantian kepemimpinan nasional, yakni dari Soeharto ke B.J. Habibie, PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri akhirnya bisa melaksanakan kongres di Bali pada tanggal 8-10 Oktober 1998, dalam kongres tersebut PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri merubah nama menjadi PDI Perjuangan. Pada tahun 1999 PDI Perjuangan mengikuti pemilu dan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menjadi parpol peserta pemilu, baik di tingkat Kota Yogyakarta, DIY maupun di tingkat Pusat.

H. Sistematika Penulisan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis data, kemudian akan disusun dalam lima Bab, yakni:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi mengenai latarbelakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan kerangka konseptual dan pendekatan, tinjauan sumber, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Demikianlah uraian singkat dari Bab I, dan selanjutnya akan dibahas Bab II yang membahas Sejarah Terbentuknya PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta.

Bab II membahas Sejarah Terbentuknya PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta, yang berisi tentang terbentuknya PDI Perjuangan di tingkat Pusat, dan proses terbentuknya PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta, tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, kendala-kendala yang dihadapi dan cara-cara yang ditempuh dalam, menghadapi kendala-kendala yang ada sehingga dapat terbentuk struktur organisasi PDI Perjuangan. Demikianlah uraian singkat dari Bab III, selanjutnya akan dibahas Bab IV tentang PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta dalam Pemilu 1999.

Bab III membahas PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Umum tahun 1999, yang berisi tentang persiapan yang dilakukan PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dalam menghadapi Pemilihan Umum tahun 1999, Pelaksanaan kampanye dan hasil perolehan suara dalam pemilihan umum tahun 1999 di Kota

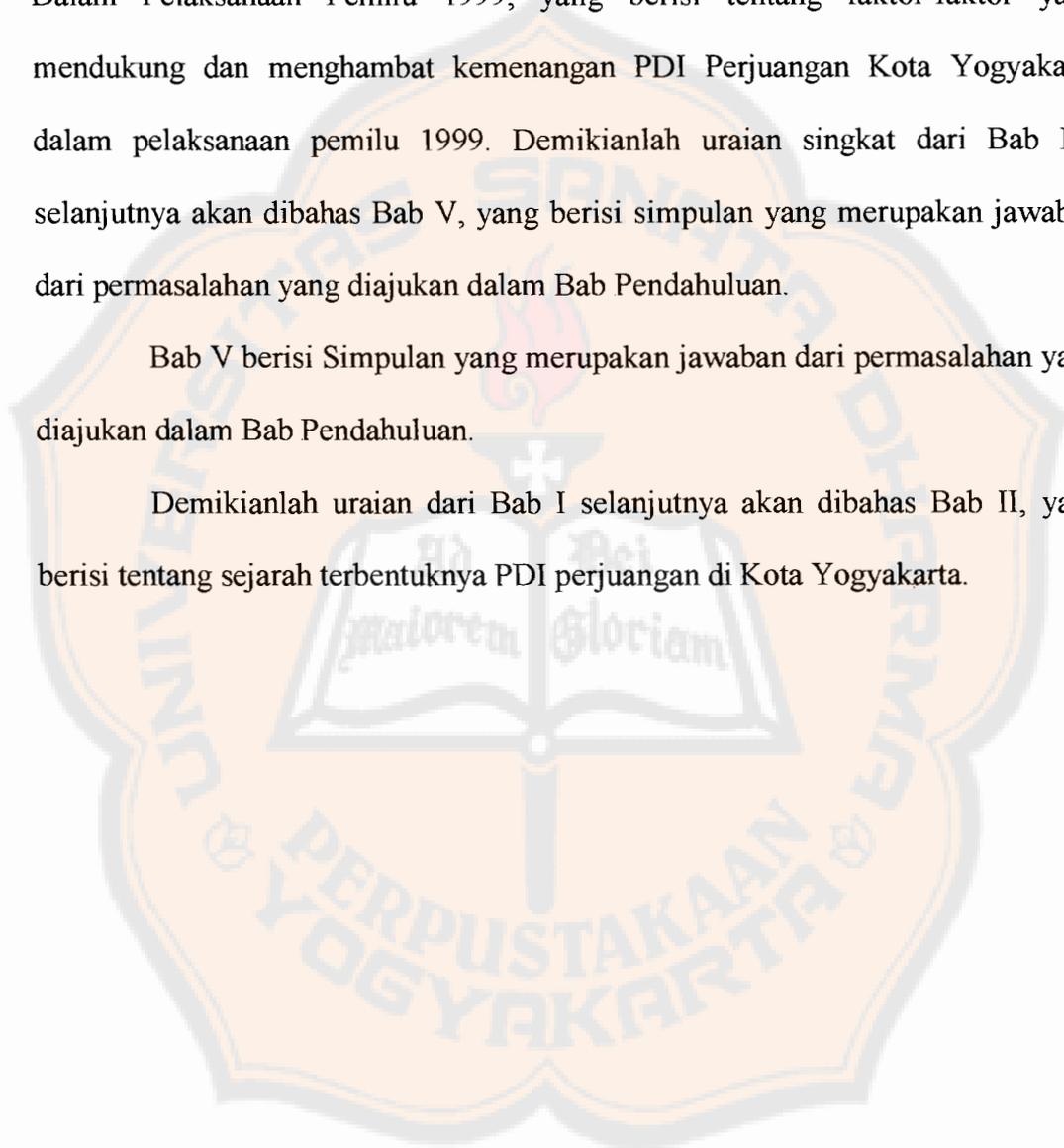
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Yogyakarta. Demikianlah uraian singkat dari Bab III, selanjutnya akan dibahas Bab IV tentang Kemenangan PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dalam Pelaksanaan Pemilu 1999.

Bab IV membahas Kemenangan PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Pemilu 1999, yang berisi tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kemenangan PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan pemilu 1999. Demikianlah uraian singkat dari Bab IV, selanjutnya akan dibahas Bab V, yang berisi simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam Bab Pendahuluan.

Bab V berisi Simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam Bab Pendahuluan.

Demikianlah uraian dari Bab I selanjutnya akan dibahas Bab II, yang berisi tentang sejarah terbentuknya PDI perjuangan di Kota Yogyakarta.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II

SEJARAH TERBENTUKNYA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN) KOTA YOGYAKARTA

A. Sejarah Perkembangan PDI hingga Terjadinya Perpecahan dalam Tubuh PDI Pasca Pelaksanaan Kongres Medan

Partai Demokrasi Indonesia atau lebih dikenal dengan nama PDI didirikan pada tanggal 10 Januari 1973. PDI merupakan fusi dari lima partai politik yang berfaham Nasionalisme, Sosialisme, Kristen Protestan, dan Kristen Katholik, yakni PNI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Murba, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katholik.¹

Setelah terbentuk, PDI tidak bisa lepas dari berbagai macam konflik yang terjadi di dalam tubuh partai. Konflik yang terjadi dalam tubuh PDI, antara lain; pada tahun 1977 yang melibatkan tokoh-tokoh dari unsur PNI. Konflik tersebut terjadi antara Sanusi-Asep dari kubu garis keras, dan Isnaeni-Sunawar dari kubu moderat. Pemicu dari konflik antara kubu Isnaeni-Sunawar dan Sanusi-Asep, yakni tentang pengklaiman kepemimpinan PDI. Konflik tersebut akhirnya dapat di selesaikan karena adanya campur tangan pihak pemerintah, yakni dengan adanya penetapan kubu Isnaeni-Sunawar sebagai pengurus DPP PDI. Campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, dilakukan sebagai usaha untuk

¹ Adriana Elizabeth Sukamto, *PDI dan Prospek Pembangunan Politik*. Jakarta: Gramedia Widayarsana Indonesia, 1991, hlm. 8.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menyingkirkan tokoh-tokoh radikal yang dianggap akan membahayakan posisi pemerintah Orde Baru.²

Dalam perkembangan selanjutnya, konflik yang terjadi dalam tubuh PDI masih terus berlanjut. Hal ini nampak pada saat penyelenggaraan Kongres ke III PDI (15-17 April 1986) di Jakarta. Hal yang memicu terjadinya konflik adalah terpilihnya Soeryadi sebagai Ketua Umum DPP PDI, sebab sebelum pelaksanaan Kongres III PDI tidak dicalonkan menjadi Ketua Umum DPP PDI, sedangkan tokoh yang banyak memperoleh dukungan dari para peserta kongres yakni Harjanto Somodisastro justru tidak terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI pada pelaksanaan Kongres III PDI. Konflik tersebut akhirnya dapat diselesaikan, karena adanya campur tangan Pemerintah berupa penetapan Soeryadi sebagai Ketua DPP PDI. Berbagai masalah yang timbul dalam tubuh PDI semenjak berdirinya PDI hingga tahun 1986, membuat perolehan suara PDI pada setiap pelaksanaan pemilu kurang memuaskan jika dibandingkan dengan dua parpol lain peserta pemilu.³

Pada saat pelaksanaan pemilihan umum tahun 1987 dan 1992, PDI mengalami peningkatan dalam hal perolehan suara, jika dibandingkan pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 1972 dan 1982. Peningkatan perolehan suara PDI pada pelaksanaan pemilihan umum 1987, dipengaruhi oleh dua faktor yakni :

- a. Faktor *ekstern* yang mendukung peningkatan perolehan suara PDI pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 1987 karena PPP mengalami penurunan dalam hal perolehan suara akibat dari kembalinya NU ke Khatib 1926.

² *Ibid.*, hlm. 55

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- b. Faktor *Intern* yang mendukung peningkatan perolehan suara PDI pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 1987, karena PDI menghadirkan Megawati Soekarnoputri sebagai juru bicara kampanye.⁴

Kehadiran Megawati Soekarnoputri pada pelaksanaan kampanye PDI tahun 1987 ternyata berhasil menarik masa, ini dibuktikan dengan banyaknya masa yang menghadiri kampanye PDI, pada saat Megawati Soekarnoputri sebagai juru bicara dalam kampanye. Kehadiran Megawati Soekarnoputri dalam kampanye PDI pada tahun 1987, ternyata berhasil menaikkan jumlah perolehan suara PDI dalam pemilihan umum tahun 1987 sebanyak 10,87% dan menempatkan wakil-wakilnya di DPR sebanyak 40 orang. Sedangkan peningkatan perolehan suara PDI pada pemilihan umum tahun 1992, yakni akibat dari perekrutan secara resmi Megawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra dalam susunan struktur organisasi PDI.⁵

Perekrutan secara resmi Megawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra dalam jajaran struktur organisasi PDI pada tahun 1992, ternyata mampu memberikan sumbangan dalam perolehan suara PDI pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 1992, sebanyak 14,90%.⁶

Pada perkembangan selanjutnya, eksistensi PDI tidak bisa lepas dari figur Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1996. Karier Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI, diawali ketika

³ *Ibid.*, hlm. 55-56.

⁴ *Tempo*, *PDI dan Pemilu*. 25 Desember 1993, hlm. 23-28.

⁵ Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi Strategi dan Program*. Jakarta: PT Gramedia, 1999, hlm. 192.

⁶ Eep Syaiyullah Fatah, *Bangsa Saya Yang Menyebalkan*. Bandung: Rosdakarya PT Remaja, 1998, hlm. 28.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pada pelaksanaan Kongres Luarbiasa (KLB) PDI di asrama Haji Sukokilo Surabaya pada tahun 1993, Megawati Soekarnoputri dicalonkan menjadi Ketua Umum DPP PDI. Namun ada upaya dari orang-orang yang berada dalam tubuh organisasi PDI yang mendapat dukungan dari pihak pemerintah, untuk mencegah langkah dari Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum DPP PDI.⁷

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah langkah Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum DPP PDI, yakni dengan cara pelarangan penggunaan sistem floor oleh Yogi S. Memet dalam pemilihan Ketua Umum DPP PDI dan adanya himbauan untuk menggunakan sistem formatur dalam pemilihan Ketua Umum DPP PDI, yang dianggap oleh Yogi S. Memet sesuai dengan ciri musyawarah dan mufakat di Indonesia.⁸

Himbauan dari pemerintah dalam penggunaan sistem formatur dalam pelaksanaan pemilihan Ketua Umum DPP PDI tersebut dinilai oleh para pengamat politik sangat menguntungkan posisi Budi Harjono untuk menjadi Ketua Umum DPP PDI, sebab jika dalam pemilihan Ketua Umum DPP PDI menggunakan sistem floor semua peserta KLB berhak memberikan suaranya secara langsung dalam pelaksanaan pemilihan Ketua Umum DPP PDI, sedangkan jika dalam pelaksanaan pemilihan Ketua Umum DPP PDI menggunakan sistem formatur seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, maka para peserta KLB dalam pelaksanaan pemilihan Ketua Umum DPP PDI tidak menggunakan hak pilihnya secara langsung dalam pemilihan Ketua DPP PDI, tetapi hanya bisa menyetujui calon Ketua Umum DPP PDI yang sudah ditetapkan oleh tim khusus, atau bisa

⁷ Riswanda Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dikatakan bahwa jika dalam pelaksanaan pemilihan Ketua Umum DPP PDI menggunakan sistem formatur seolah-olah para peserta KLB hanya sebagai penggembira saja, sebab hanya bisa bersikap menyetujui tentang calon Ketua Umum DPP yang telah ditetapkan oleh tim formatur. Dengan adanya anjuran dari pemerintah untuk menggunakan sistem formatur, menurut Riswanda Imawan merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah langkah dari Megawati Soekarnoputri untuk menjadi Ketua Umum DPP PDI.⁹

Anjuran dari pemerintah agar menggunakan sistem formatur dalam pelaksanaan pemilihan Ketua Umum DPP PDI pada pelaksanaan KLB di asrama Haji Sukokilo ditolak oleh para peserta KLB, sebab para peserta KLB beranggapan bahwa penggunaan sistem floor merupakan cara terbaik (sesuai dengan asas demokrasi). Mereka belajar dari kenyataan yang selama ini terjadi, bahwa sistem formatur selalu melahirkan elit yang kurang aspiratif terhadap dinamika partai.¹⁰

Akhirnya setelah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghambat langkah Megawati Soekarnoputri untuk menjadi Ketua Umum DPP PDI dapat diatasi, maka pada tanggal 6 Desember 1993 akhirnya Megawati Soekarnoputri berhasil menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998, secara *de facto*.¹¹ Keberhasilan dari Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum DPP PDI secara *de facto*, tidak terlepas dari peranan ” tim sukses”, yang mendukung

1997, hlm. 28.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

langkah Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum DPP PDI. Adapun nama-nama “tim sukses” yang secara khusus mempunyai peranan terhadap keberhasilan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum DPP PDI secara *de facto*, antara lain; Taufik Kiemas, Aberson Marle Sihalohe, Sophan Sophiaan, Djati Koesumo, Mangara Siahaan, Suparlan, Gusti Bahar, dan Sidik Singadekane.¹²

Taufik Kiemas (suami Megawati Soekarnoputri) memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong Megawati Soekarnoputri untuk dapat menduduki kursi tertinggi di PDI. Taufik Kiemas tidak hanya memberikan dorongan moral pada Megawati Soekarnoputri, tetapi ia juga memberikan sumbangan dana yang berasal dari keuntungan pompa bensin miliknya di Jakarta untuk mendukung keberhasilan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum DPP PDI.¹³

Nama berikutnya yang dianggap berjasa dalam mensukseskan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum DPP PDI secara *de facto*, yakni Aberson Marle Sihalohe. Ia merupakan salah satu orang yang mengajak dan membujuk Megawati Soekarnoputri agar bersedia bergabung dalam organisasi PDI pada tahun 1987. Keberhasilan Aberson dalam mensukseskan langkah Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum DPP PDI, diawali dengan keberhasilannya membujuk Dewan Pimpinan Cabang-Cabang PDI untuk memilih Megawati Soekarnoputri dalam pelaksanaan pemilihan Ketua Umum DPP PDI pada pelaksanaan KLB PDI di asrama Haji Sukukilo Surabaya.¹⁴

¹¹ *Ibid.*, hlm. 118-122.

¹² Ahmad Bahar, *Biografi Politik Megawati Soekarnoputri 1993-1996*. Yogyakarta: PT Pena Cendekia, 1996, hlm. 55-58.

¹³ *Ibid.*, hlm. 58-59.

¹⁴ *Ibid.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sementara itu Sophan Sophiaan dinilai sukses mengangkat Megawati Soekarnoputri, sebagai dampak dari keberhasilannya melobi dan mengajak DPC PDI Sulawesi Selatan untuk mendukung pencalonan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum DPP PDI. Disamping itu ia dinilai sangat pandai dalam menggaris bawahi setiap komentar dari para pejabat pemerintah yang dirasa tidak keberatan terhadap pencalonan dari Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI.

Djati Kusumo secara khusus mempunyai peranan dalam hal pengerahan masa yang berjumlah sekitar seratus orang di rumah Megawati Soekarnoputri, tujuan dari adanya pengerahan masa di rumah Megawati Soekarnoputri yakni untuk memberikan citra bahwa pencalonan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum DPP PDI mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat. Peranan dari Mangara Siahaan dalam rangka mensukseskan pencalonan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI, yakni melakukan berbagai macam usaha untuk menepis sejumlah isu yang berkembang di masyarakat dan KLB yang bertujuan untuk menggagalkan usaha Megawati Soekarnoputri untuk menjadi Ketua Umum DPP PDI.¹⁵

Setelah Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998 secara *de facto*, dalam perkembangan selanjutnya berkat adanya desakan yang kuat dari masa arus bawah terhadap pemerintah agar mau mengakui Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI, akhirnya pemerintah terpaksa mau mengakui Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 59-60.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dengan adanya pengakuan secara resmi dari pemerintah tentang kedudukan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998, maka dua minggu setelah pelaksanaan KLB PDI di Surabaya kemudian PDI mengadakan Musyawarah Nasional (MUNAS) di Jakarta, untuk meresmikan kedudukan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998.¹⁶

Setelah menjabat sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1996, ternyata Megawati Soekarnoputri dan para pendukungnya mendapatkan banyak tekanan baik mental maupun fisik. Adapun bentuk-bentuk tekanan tersebut, antara lain adanya perseteruan yang terjadi dalam tubuh DPD PDI di Jawa Timur tentang dualisme kepemimpinan, antara Latif Pujasakti dan Sucipto. Perseteruan antara Latif Pujasakti dan Sucipto ini bermula dari masalah klaim kepemimpinan. Baik pihak Sucipto maupun Latif Pujasakti, masing masing pihak merasa paling berhak untuk menduduki jabatan sebagai Ketua DPD PDI Jawa Timur.

Sucipto merasa berhak menduduki jabatan Ketua DPD PDI Jawa Timur sebab ia diangkat resmi oleh Megawati Soekarnoputri berdasarkan pada SK DPP PDI No. 043 Tahun 1994. Sedangkan Latif Pujasakti merasa dirinya yang paling berhak menduduki jabatan Ketua DPP PDI Jawa Timur, karena mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Timur (Basofi Sudirman). Namun pertikaian antara Sucipto dan Latif ini bisa diselesaikan berkat adanya dukungan yang kuat dari

¹⁶ Riswanda Imawan, *op-cit.*, hlm. 237.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

masa arus bawah, yang berusaha mencegah upaya untuk menjatuhkan kepengurusan PDI yang sah.¹⁷

Tekanan paling berat yang dirasakan oleh PDI pada masa pemerintahan orde baru, yakni adanya upaya dari pemerintah orde baru untuk memecah belah PDI. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecah belah PDI berupa pelaksanaan Kongres di Medan pada tanggal 20-22 Juni 1996 atau lebih dikenal dengan nama Kongres Medan. Pelaksanaan kongres Medan tersebut diprakarsai oleh 16 anggota DPP PDI yang dipimpin oleh Fatimah Ahmad, dan mendapat dukungan dari pemerintah. Adapun dalih dari pemerintah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Kongres Medan, karena pemerintah menganggap kepemimpinan Megawati Soekarnoputri tidak konstitusional. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah orde baru terhadap penyelenggaraan Kongres Medan untuk menggesur kedudukan Megawati Soekarnoputri menurut beberapa pengamat politik, merupakan salah satu bentuk ketakutan pemerintah orde baru terhadap kekuatan dari para pendukung PDI, yang dikhawatirkan akan menjadi pemenang dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum tahun 1997.¹⁸

Dukungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan Kongres Medan, justru menimbulkan simpati dari masyarakat terhadap Megawati Soekarnoputri, ini dibuktikan dengan adanya berbagai aksi demonstrasi yang digelar pada tanggal 20 Juni 1996 oleh berbagai ormas, yang menentang pelaksanaan Kongres di Medan.¹⁹ Aksi demonstrasi yang digelar oleh berbagai

¹⁷ Achmad Bahar, *op-cit.*, hlm. 83-84.

¹⁸ A.A. Sudirman Achmadi, *Lima Tahun KOMNAS HAM Catatan Wartawan*. Jakarta: Forum Akal Sehat dan INPI, 1999, hlm. 144.

¹⁹ *Ibid.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Ormas tersebut, ternyata mengakibatkan terjadinya bentrokan antara para peserta aksi demonstrasi dengan pihak keamanan. Peristiwa bentrokan antara pihak keamanan dengan masa yang menggelar aksi demo tersebut kemudian dikenal sebagai peristiwa Gambir Berdarah.²⁰

Dalam pelaksanaan Kongres Medan Yang Menghabiskan biaya 3 Milyar tersebut, Fatimah Achmad dan kawan-kawannya berhasil menetapkan Suryadi Sebagai Ketua Umum DPP PDI dan Buntu Hutapea sebagai Sekertaris Jendral DPP PDI, dan berhasil menggusur kedudukan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI. Setelah pelaksanaan Kongres Medan dan terbentuk susunan pengurus organisasi PDI, sebagai wujud dari pengakuan dan dukungan pemerintah terhadap susunan kepengurusan PDI hasil dari Kongres Medan yang dipimpin oleh Suryadi, maka kemudian Feisal Tanjung berjanji akan membantu Suryadi untuk mengambil alih kantor DPP PDI yang diduduki oleh para pendukung Megawati Soekarnoputri.²¹

Setelah pelaksanaan Kongres Medan dan menghasilkan keputusan pengangkatan Suryadi sebagai Ketua Umum DPP PDI dan mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, maka kemudian PDI pecah menjadi dua kubu yakni: PDI hasil MUNAS yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri (PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri) dan PDI hasil dari pelaksanaan Kongres Medan yang dipimpin oleh Suryadi atau lebih dikenal dengan nama PDI hasil Kongres Medan. Para pendukung Megawati Soekarnoputri untuk membedakan

²⁰ YLBHI, 1999 *Tahun Kekerasan Potret Pelanggaran HAM Indonesia*. YLBHI, 1997, hlm. 1-8.

²¹ A.A. Sudirman Achmadi, *op.cit.*, hlm 144.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kelompoknya dengan kelompok PDI hasil Kongres Medan, kemudian membentuk organisasi yang disebut dengan PDI Pro Mega.²²

Dampak dari adanya konflik yang terjadi dalam tubuh PDI yang menimbulkan terjadinya perpecahan dalam tubuh PDI setelah pelaksanaan Kongres Medan, yakni adanya anggapan dari kedua kubu, baik kubu PDI hasil Kongres Medan maupun kubu PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai struktur organisasi PDI yang sah. Kubu PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri menganggap dirinya sebagai pengurus DPP PDI yang sah dan menganggap kubu PDI hasil Kongres Medan sebagai susunan pengurus DPP PDI yang *ilegal*, sebab merupakan hasil rekayasa dari pemerintah orde baru untuk menggusur kedudukan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI. Sedangkan kubu PDI hasil Kongres Medan menganggap dirinya sebagai pengurus dari struktur organisasi PDI yang sah karena mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan merasa berhak untuk mengikuti pemilihan umum tahun 1999.²³

Upaya pengusuran terhadap kedudukan Megawati Soekarnoputri ini terjadi karena adanya keawatiran dari pihak pemerintah orde baru terhadap kekuatan PDI setelah Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Ketua Umum DPP PDI, yang diawatirkan akan membahayakan eksistensi pemerintah orde baru pada pelaksanaan pemilihan umum 1997, oleh karena itu pemerintah berusaha untuk menggusur kedudukan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI.²⁴

²² Veven Wardana, *op.cit.*, hlm. 20-22.

²³ Suprianto Widodo, *Proposal Penelitian Kemenangan Suara PDI Perjuangan dalam Pemilu 1999*. Yogyakarta: STPD APMD Yogyakarta, hlm.5.

²⁴ Veven Wardana, *op.cit.*, hlm. 20-22.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Setelah Suryadi terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI pada pelaksanaan Kongres Medan, dan dianggap oleh pemerintah orde baru sebagai pimpinan dari DPP PDI yang sah, maka kemudian ia berusaha untuk merebut kantor DPP PDI yang diduduki oleh PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri. Keinginan Suryadi untuk mengambil alih kantor DPP PDI yang terletak di jalan Diponegoro tersebut dibantu oleh aparat keamanan yang telah disiapkan oleh Faisal Tanjung. Peristiwa perebutan dari kantor DPP PDI tersebut, kemudian dikenal dengan nama peristiwa 27 Juli 1996, yang mengakibatkan hilangnya 23 masa pendukung setia Megawati Soekarnoputri.²⁵

Adanya peristiwa penyerbuan terhadap kantor DPP PDI oleh Suryadi yang dibantu oleh aparat keamanan, pihak pemerintah orde baru menduga PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri telah hancur, namun ternyata PDI Pimpinan Megawati Soekarnoputri tetap eksis. Bahkan PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri dengan adanya peristiwa 27 Juli dengan melakukan langkah "*legal action*", yakni dengan cara membentuk TPDI (Tim Pembela Demokrasi Indonesia) untuk mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap PDI hasil Kongres Medan, Pemerintah, dan aparat keamanan, untuk meminta pertanggung jawaban mereka sehubungan dengan terjadinya peristiwa 27 Juli 1996. Hasil dari setiap gugatan yang diajukan oleh PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri terhadap PDI hasil Kongres Medan, Pemerintah dan aparat keamanan tidak pernah dimenangkan oleh PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri, hal ini terjadi karena pada masa itu, kedudukan pemerintah orde baru masih kuat dan adanya keinginan

²⁵ YLBHI, *op.cit.*, hlm.4.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dari pemerintah orde baru untuk menghancurkan eksistensi dari PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri, yang dianggap mengancam eksistensi pemerintah orde baru pada saat pelaksanaan pemilihan umum tahun 1997.²⁶

Menjelang pelaksanaan pemilihan umum 1997, PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri mengajukan calon-calon anggota legeslatif kepada panitia pemilihan umum, namun calon-calon yang diajukan oleh PDI Megawati Soekarnoputri ditolak oleh pemerintah. Alasan penolakan calon-calon legeslatif yang diajukan oleh PDI Pimpinan Megawati Soekarnoputri, karena PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai partai yang *illegal*, dan menganggap PDI hasil Kongres merupakan partai yang sah dan berhak ikut dalam pelaksanaan pemilihan umum. Adanya penolakan terhadap calon-calon anggota legeslatif yang diajukan oleh PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri oleh pemerintah, maka kemudian melalui Pesan Harian Ketua Umum DPP PDI 1993-1998 No: X/KETUM/IV/1997, Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan DPP PDI yang sah dan konstitusional, menyatakan kepada para pendukung dan simpatisan PDI, bahwa DPP PDI Hasil MUNAS Periode 1993-1998 tidak menyelenggarakan kegiatan kampanye pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 1997.²⁷

Melalui Pesan Harian Ketua Umum DPP PDI 1993-1998 No: XII/KETUM/V/1997 yang disampaikan pada tanggal 22 Mei 1997, Megawati Soekarnoputri mengumumkan bahwa dirinya memutuskan untuk tidak menggunakan hak politik untuk memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum 1997, dalam pelaksanaan pemilihan umum 29 Mei 1997.

²⁶ *Dokumen PDI Perjuangan Tentang Evaluasi Hasil Akhir Tahun 1999 dan Prospeknya*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Disamping itu Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada seluruh jajaran partai dan Keluarga Besar PDI hasil MUNAS, di seluruh Tanah Air untuk mempergunakan kartu suara sebaik-baiknya, memantapkan hati dan pikiran untuk menentukan dan mempergunakan hak politik sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan hati nurani masing-masing, melaksanakan fungsi kesaksian pada saat pelaksanaan pemungutan suara dengan penuh tanggung jawab dan semangat memperjuangkan terciptanya pemilihan umum yang demokratis, dan mencatat hasil penghitungan suara di setiap TPS dimanapun berada, dan mencatat setiap manipulasi dan intimidasi pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara.²⁸

Keputusan yang ditempuh oleh Megawati Soekarnoputri untuk tidak menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum 1997, ternyata diikuti oleh para pendukungnya. Ini terbukti ketika pelaksanaan penghitungan hasil perolehan suara, ternyata di wilayah-wilayah yang merupakan basis dari PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri banyak kartu suara yang dinyatakan gugur, bahkan ada sebagian warga pendukung PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri yang mengembalikan kartu kuning kepada petugas TPS. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya PDI hasil Kongres Medan tidak dikehendaki oleh rakyat.²⁹

Memasuki Era Dasawarsa Abad ke-21.

²⁷ *Pesan Harian Ketua Umum DPP PDI 1993-1998, No: X/V/KETUM/IV/1997.*

²⁸ *Pesan Harian Ketua Umum DPP PDI 1993-1998, No: XII/V/KETUM 1997.*

²⁹ *Adil, 28 April 1998, hlm.6.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Berdirinya PDI Perjuangan di Tingkat Pusat

Pada tanggal 21 Mei 1998 terjadi perubahan politik di Indonesia yang ditandai dengan pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden RI, dan digantikan oleh Habibie. Pergantian kepemimpinan di Indonesia ini membawa harapan baru bagi rakyat Indonesia, sebab sebagai pemegang pemerintahan masa transisi Habibie mengagendakan pelaksanaan pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999.

Sebagai langkah awal dari proses pelaksanaan pemilihan umum 1999, pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk membentuk partai politik, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum tahun 1999. Adanya rencana pemeritahan untuk melaksanakan pemilihan umum, disambut gembira oleh Megawati Soekarnoputri beserta para pendukungnya yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum 1999.

Pergantian pemerintahan dari Soeharto ke B.J. Habibie, ternyata tidak mengubah sikap pemerintah terhadap PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri. Presiden B.J. Habibie secara formal tidak mengakui keberadaan PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri dan menganggap partai tersebut sebagai partai yang *illegal*, dan hanya mengakui PDI hasil Kongres Medan sebagai partai yang sah. Hal ini dapat dilihat ketika PDI hasil Kongres Medan mengadakan kongres di Palu, pihak pemerintah memberikan restu, bahkan pihak pemerintah memberikan bantuan berupa jaminan keamanan pada saat pelaksanaan kongres di Palu yang dilaksanakan pada tanggal 25-29 Agustus 1998. Dalam pelaksanaan Kongres di

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Palu tersebut, berhasil mengambil keputusan berupa penetapan Budi Hardjono sebagai Ketua DPP PDI menggantikan kedudukan Suryadi.³⁰

Sedangkan pada saat PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri bermaksud hendak melaksanakan kongres di Denpasar Bali, pemerintah berusaha menghalang pelaksanaan kongres tersebut dengan alasan keamanan. Namun karena adanya jaminan keamanan dari warga simpatisan PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri, akhirnya PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil menyelenggarakan “Kongres Perjuangan” di Denpasar Bali pada tanggal 8-10 Oktober 1998 atas swasembada partai, sebab segala sesuatu yang menyangkut persiapan dan pelaksanaan kongres dipersiapkan oleh seluruh warga simpatisan PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri tanpa bantuan dari pihak pemerintah.³¹

Dalam pelaksanaan kongres tersebut, berhasil menetapkan penggunaan kata “perjuangan” di belakang nama PDI, untuk menyebut PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri, sehingga nama partai politik pimpinan Megawati Soekarnoputri ini kemudian berubah menjadi PDI Perjuangan, dengan azas Pancasila dan bercirikan Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Disamping itu dalam pelaksanaan Kongres di Bali, PDI Perjuangan berhasil menghasilkan tiga keputusan penting yang bersifat strategis bagi kelangsungan hidup PDI Perjuangan, yakni:

1. PDI Perjuangan harus ikut dalam pelaksanaan pemilihan umum 1999.
2. PDI Perjuangan harus menang dalam pemilihan umum 1999.

³⁰ Gatra, *Pelaksanaan Kongres PDI di Palu Mendapat Pwngawalan Ketat dari Aparat Keamanan*. 14 September 1998, hlm. 14.

³¹ *Dokumen PDI Perjuangan tentang Evaluasi Hasil Akhir Tahun 1999 dan Prospeknya Memasuki Eka Dasa Warsa Abad ke 21, op.cit.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Mengantarkan Ketua Umum terpilih menjadi presiden RI.³²

Keputusan yang dihasilkan dalam pelaksanaan kongres di Bali tersebut, kemudian menjadi amanat yang harus dijalankan oleh DPP PDI Perjuangan dan seluruh jajarannya. Kemudian dalam pelaksanaan Kongres di Bali tersebut, PDI Perjuangan berhasil menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI dan Alexander Litay sebagai Sekertaris Jendral DPP PDI Periode 1998-2003. Dengan ditetapkannya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, maka secara otomatis PDI Perjuangan kemudian berusaha mengantarkan Megawati Soekarnoputri untuk mencalonkan dirinya sebagai presiden RI.³³

Usaha yang dilakukan oleh PDI Perjuangan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum 1999, mengalami hambatan dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa tidak memperbolehkan partai politik menggunakan nama dan lambang yang telah dipergunakan oleh partai lain yang telah ada. Hal itu tentu saja menghambat keinginan dari PDI Perjuangan untuk mengikuti kegiatan dari pelaksanaan pemilihan umum 1999, sebab meskipun PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri telah mengubah nama partai yang dipimpinnya menjadi PDI Perjuangan, tetapi PDI Perjuangan pada saat itu masih menggunakan lambang partai yang sama seperti pada saat PDI didirikan pada tahun 1971. Dan setelah pelaksanaan kongres Medan, yang akhirnya menyebabkan PDI pecah menjadi dua kubu yakni kubu PDI hasil Kongres Medan dan PDI pimpinan Megawati

³² *Ibid.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Soekarnoputri, dan ternyata PDI yang diakui oleh pemerintah adalah PDI hasil Kongres Medan, yang setelah pelaksanaan kongres di Palu kemudian dipimpin oleh Budi Hardjono, ini menandakan bahwa menurut peraturan dari pemerintah yang berlaku yang berhak menggunakan lambang kepala banteng seperti pada saat PDI didirikan pada tahun 1971, pada pelaksanaan pemilihan umum 1999 adalah PDI yang dipimpin oleh Budi Hardjono.³⁴

Namun karena adanya keinginan yang kuat dari PDI Perjuangan untuk dapat mengikuti pelaksanaan pemilihan umum 1999, dan untuk melaksanakan amanat dari hasil Kongres PDI Perjuangan, maka PDI Perjuangan kemudian mengubah lambang partai menjadi banteng gemuk dalam lingkaran bulat dengan mulut putih dan mata merah menyala. Makna dari lambang PDI Perjuangan yakni: Banteng gemuk melambangkan besarnya kekuatan dari para pendukung PDI Perjuangan, lingkaran bulat melambangkan kebulatan dari tekad PDI Perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi, mulut putih melambangkan bahwa PDI Perjuangan berkata jujur dan mata merah menyala melambangkan keberanian dari PDI Perjuangan untuk berpihak kepada kebenaran dan menegakkan demokrasi.³⁵

Setelah memiliki lambang partai yang baru, kemudian PDI Perjuangan memproses pendirian partai berdasarkan pada akta notaris yang disahkan oleh Akta Notaris Syamsul Rizal pada tanggal 1 Pebruari 1999, dengan judul Akta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian PDI Perjuangan mendaftarkan diri ke Departemen Dalam Negeri sebagai salah satu partai peserta pemilihan

³³ *Dokumen Risalah Kongres Bali.*

³⁴ *Kompas, op.cit., hlm.192.*

³⁵ *Wawancara dengan Widi Praptomo, Sekertaris II PDI Perjuangan tanggal 20 Maret 2001.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

umum dan mendapatkan nomor urut 11 dalam pelaksanaan pemilihan umum 1999.³⁶

Setelah resmi menjadi salah satu partai politik peserta pemilihan umum dengan nomor urut 11, kemudian PDI Perjuangan melakukan peresmian lambang dan nama serta nomor urut partai dalam pelaksanaan pemilihan umum 1999, sekaligus melakukan sosialisasi lambang dan nama partai serta nomor urut partai dalam pelaksanaan pemilihan umum 1999 kepada masyarakat. Peresmian terhadap nama, lambang serta nomor urut dari partai PDI Perjuangan dilaksanakan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada tanggal 11 Pebruari 1999, di Istora Senayan Jakarta.³⁷

C. Berdirinya PDI Perjuangan Kota Yogyakarta

1. Situasi sebelum Pelaksanaan Kongres Bali

Setelah pelaksanaan Kongres Medan pada tahun 1996 yang mengakibatkan PDI pecah menjadi dua kubu yakni kubu PDI hasil Kongres Medan dan PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri, kemudian Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan DPP PDI yang sah dan konstitusional berdasarkan pada hasil MUNAS 1993 menulis surat pada pimpinan DPC PDI Kota Yogyakarta. Adapun isi surat tersebut berupa instruksi dari pimpinan DPP PDI hasil MUNAS 1993, untuk melakukan pembubaran terhadap kepengurusan DPC PDI Kota Yogyakarta, dan membentuk kembali susunan kepengurusan DPC

³⁶ *Dokumen Risalah Kongres PDI Perjuangan di Semarang tahun 2000.*

³⁷ *Kompas, op.cit., hlm. 192.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PDI yang bersih dari unsur pemerintah dan masih setia pada kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.³⁸

Menanggapi surat yang diterima dari Megawati Soekarnoputri, kemudian Tarigan Sibero dan Tatang mengundang para pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Kota Yogyakarta dan para Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) untuk membahas instruksi yang diterima dari Megawati Soekarnoputri. Upaya untuk mengumpulkan para pengurus dan pimpinan PAC PDI Kota Yogyakarta mengalami kesulitan, karena sebagian dari para pengurus DPC dan pimpinan PAC PDI Kota Yogyakarta memilih menunggu sampai situasi aman, sebab adanya ketakutan dari sebagian para pengurus DPC dan pimpinan PAC PDI Kota Yogyakarta, karena adanya intimidasi yang dilakukan oleh pihak keamanan, karena pemerintah tidak mengakui PDI Pimpinan Megawati Soekarnoputri dan menganggapnya sebagai partai yang *ilegal*. Maka dengan adanya hambatan dari pihak petugas keamanan yang selalu mengintimidasi para anggota simpatisan PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri, dan keterbatasan anggota PDI karena sebagian besar dari para pengurus PDI menunggu situasi aman, maka rapat untuk membentuk susunan pengurus PDI terpaksa dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dilakukan secara berpindah-pindah di rumah para pengurus DPC PDI kedudukan pemerintah orde baru.³⁹

Setelah melakukan beberapa kali rapat di rumah para pengurus DPC PDI secara bergantian dan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari intimidasi dari aparat keamanan, akhirnya menghasilkan keputusan untuk melakukan

³⁸ *Wawancara dengan Catur Gono Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD II Kota*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Konfrensi Cabang Khusus, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1996. Dalam pelaksanaan Konfrensi Cabang Khusus pada tanggal 4 Juli 1996 di Kantor DPD PDI di Jalan Veteran. Dalam pelaksanaan Konfrensi Cabang Khusus tersebut, menurut Nuryadi karena terbatasnya jumlah para pengurus DPC PDI yang hadir, maka akhirnya diputuskan untuk menunjuk Tarigan Sibero dan TH. Sumardjono sebagai formatur.⁴⁰

Setelah ditunjuk sebagai formatur, Tarigan Sibero dan TH. Sumardjono sebagai, kemudian mulai membentuk susunan pengurus organisasi PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri. Adapun hasil dari susunan organisasi pengurus PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri Kota Yogyakarta masa bakti 1996-1999, adalah:

Ketua Umum : TH. Sumardjono
Wakil Ketua I : Nuryadi
Wakil Ketua II : Cindelaras Yulianto
Wakil Ketua III : Catur Gono
Wakil Ketua IV : Iswantoro, SH.
Wakil Ketua V : Drs. Catur Gono
Wakil Ketua IV : Soesianto
Wakil Ketua VII : Winasis
Wakil Ketua VIII : Ny. Wahyu Indiyati

Yogyakarta, tanggal 20 November 2000.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Wawancara dengan Nuryadi Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD II Kota Yogyakarta tanggal 20 November 2000.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sekretaris : Bahtanisyar Basyir
Wakil Sekretaris I : Widi Praptomo
Wakil Sekretaris II : Rahadjeng Arhuna Adininggar
Wakil Sekretaris III : Supriyadi
Bendahara : Bambang Wirawan
Wakil Bendahara I : Sri Suprapti
Wakil Bendahara II : Effendi Hako.⁴¹

Setelah terbentuk susunan pengurus DPC PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri Kota Yogyakarta periode 1996-1999 pada tanggal 4 Juli 1996, kemudian nama-nama para pengurus DPC PDI tersebut diajukan ke DPP PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri untuk dilakukan pengesahan terhadap susunan pengurus DPC PDI yang baru. Akhirnya susunan pengurus DPC PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri Kota Yogyakarta disahkan oleh DPP PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri berdasarkan pada Surat Keputusan DPP PDI No: 627/IST/DPP/KPTS/VII/1996, pada tanggal 24 Juli 1996.⁴²

Selain pembentukan struktur organisasi pengurus PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri Kota Yogyakarta, dalam Konfrensi Cabang Khusus tersebut juga dilakukan pemilihan Pimpinan Anak Cabang (PAC). Jika pada pemilihan struktur organisasi pengurus DPC PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri Kota Yogyakarta, ditunjuk oleh Tim formatur tetapi pada pemilihan Ketua PAC dilakukan dengan cara sukarela, yakni berdasarkan atas kemauan secara sukarela dari para pengurus PAC yang hadir dalam Konfrensi Cabang Khusus untuk

⁴¹ *Dokumen Hasil Rapat PDI tanggal 4 Juli 1996.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menjadi Ketua PAC. Hal ini dilakukan karena ada beberapa pimpinan PAC yang tidak hadir pada saat pelaksanaan Konferensi Cabang Khusus karena adanya intimidasi dari pihak keamanan. Adapun nama-nama dari para Ketua PAC PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri, dari 14 Kecamatan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta, yakni:

- a. Kecamatan Umbulharjo : Drs. Widiyanto
- b. Kecamatan Kota Gede : Subardjo Broto Mulyono
- c. Kecamatan Gondokusuman : Supariyo
- d. Kecamatan Jetis : Drs. Herkitanto
- e. Kecamatan Mergangsan : I Made Dwi Putra
- f. Kecamatan Danurejan : Herimawan, SH.
- g. Kecamatan Kraton : Agus Telev
- h. Kecamatan Mantrijeron : Suyudi
- i. Kecamatan Ngampilan : Drs. Sudharmo
- j. Kecamatan Wirobrajan : Wisnu Sabdono
- k. Kecamatan Gedongtengen : Karsono
- l. Kecamatan Tegalrejo : M. Surandi, B.A.
- m. Kecamatan Gondomanan : Suratjiman.⁴³

Setelah terbentuk susunan pengurus DPC dan disahkan pada tanggal 24 Juli 1996 oleh Ketua DPP PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri, maka kemudian pada tanggal 1 Agustus 1996 para pengurus DPC PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri Kota Yogyakarta dan DPD PDI pimpinan Megawati

⁴² *Dokumen Surat Keputusan DPP PDI Tanggal 5 Juli 1996.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Soekarnoputri Daerah Istimewa Yogyakarta, mengadakan rapat untuk membentuk Departemen dan Kesekretariatan DPD PDI Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari rapat yang dilakukan pada tanggal 1 Agustus 1996, berhasil menetapkan pembentukan Departemen dan Kesekretariatan DPD PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri Daerah Istimewa Yogyakarta. Susunan dari para pengurus Departemen dan Kesekretariatan DPD PDI Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian disahkan pada tanggal 3 Agustus 1996, oleh Ketua DPD PDI Daerah Istimewa Yogyakarta Parte Tarigan Sibero, SH., berdasarkan pada Surat Keputusan No: 34/SEK/DPD/KPTS/IN/VIII/1996.⁴⁴

Setelah terbentuk susunan dari pengurus DPC PDI Kota Yogyakarta, dan terbentuknya Departemen dan kesekretariatan DPD PDI Daerah Istimewa Yogyakarta, maka susunan dari struktur organisasi DPC PDI Kota Yogyakarta dapat dijabarkan, sebagai berikut:

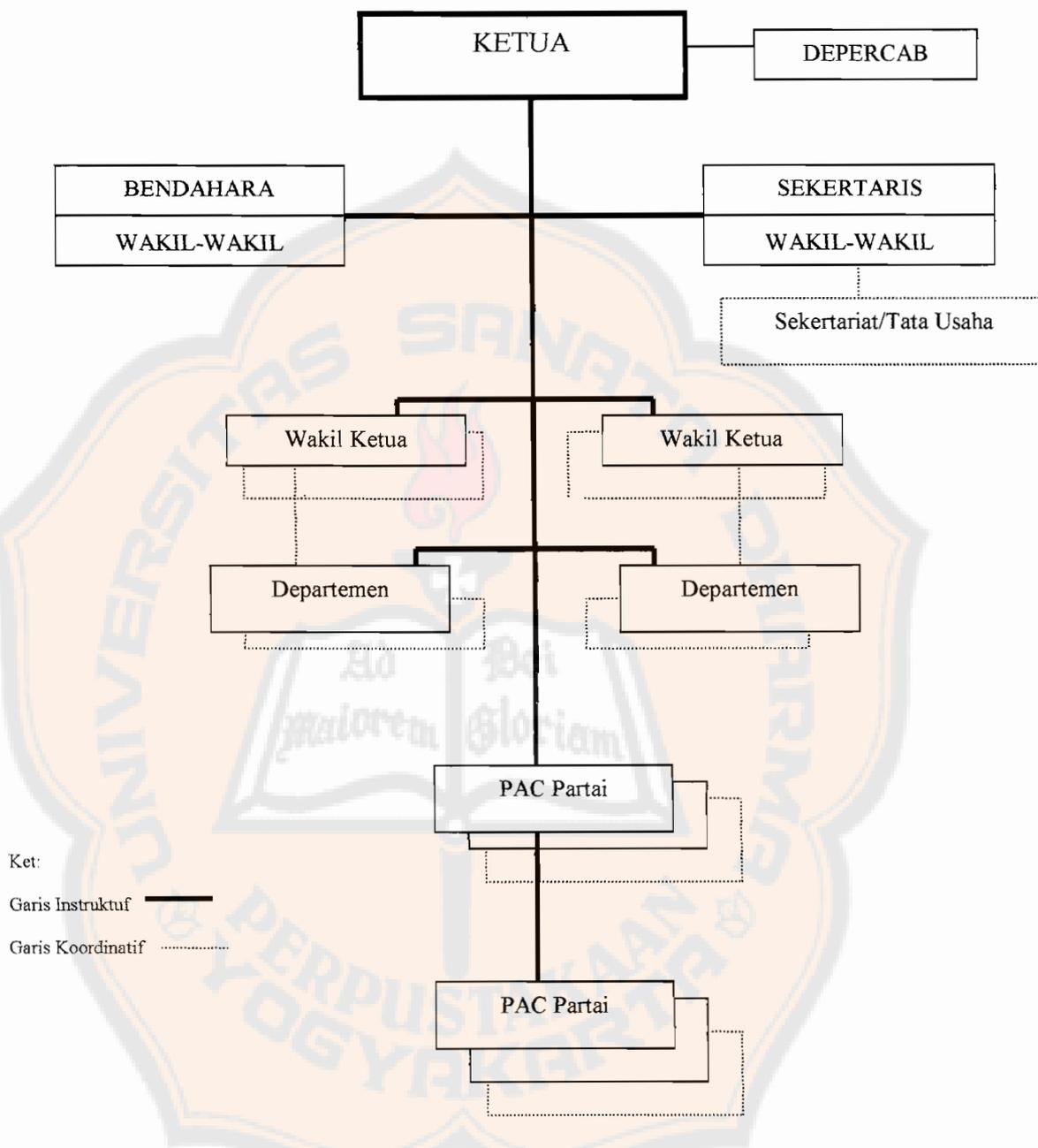
⁴³ Wawancara dengan Widi Praptomo, 20 Februari 2001.

⁴⁴ *Ibid.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 2.1

BAGAN ORGANISASI DPC PDI KOTA YOGYAKARTA



Sumber: Hasil Rapat PDI Pimpinan Megawati Soekarnoputri, Agustus 1996. ⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Setelah terbentuk susunan pengurus DPC PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri Kota Yogyakarta, dan dilakukan pemilihan Ketua PAC PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri Kota Yogyakarta, serta adanya pembentukan Departemen dan Sekertariat DPP PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri Daerah Istimewa Yogyakarta, maka kemudian pada tanggal 23 September 1996 dilakukan pelantikan para pengurus DPC PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri Kota Yogyakarta, Ketua PAC dan Anggota Departemen dan Kesekretariat DPD PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri Daerah Istimewa Yogyakarta, bertempat di Kantor DPD PDI Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Tentara Rakyat Mataram No. 47.⁴⁶

Dalam pelaksanaan rapat yang dilakukan oleh para pengurus DPC PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri Kota Yogyakarta dalam usahanya untuk membentuk struktur pengurus DPC PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri Kota Yogyakarta yang bersih dari unsur campur tangan pemerintah dan setia pada DPP PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami banyak hambatan, adapun bentuk-bentuk hambatan yang dialami oleh para pengurus DPC PDI Kota Yogyakarta, yakni:

- a. Hambatan yang berasal dari luar partai, yakni berupa intimidasi yang berasal dari pihak aparat keamanan, sebab PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri dianggap oleh Pemerintah sebagai partai yang *ilegal*, dan mereka hanya mengakui PDI hasil Kongres Medan sebagai partai yang sah.

⁴⁶ *Ibid.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- b. Hambatan yang berasal dari dalam partai, yakni adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda dari para pengurus DPC PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri Kota Yogyakarta, perbedaan pendapat ini terjadi karena adanya perbedaan persepsi antara golongan tua dan golongan muda dari para pengurus partai, dimana golongan tua berpandangan bahwa mereka merasa berjasa dan mempunyai andil yang besar dalam proses pendirian DPC PDI Kota Yogyakarta, sehingga mereka berpendapat bahwa usulan-usulan yang mereka berikan hendaknya bisa dijadikan sebagai bahan acuan dalam proses pembentukan struktur organisasi DPC PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri Kota Yogyakarta sesuai dengan amanat yang diberikan oleh pimpinan DPP PDI Megawati Soekarnoputri. Sedangkan golongan muda dalam struktur organisasi pengurus DPC PDI Kota Yogyakarta, beranggapan bahwa mereka merasa lebih berkualitas jika dibandingkan dengan golongan tua.⁴⁷

Berbagai macam bentuk hambatan yang ada dalam proses pembentukan Struktur organisasi DPC PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri di Kota Yogyakarta, akhirnya dapat diatasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: untuk menghadapi adanya hambatan interfensi dari pemerintah terutama dari pihak-pihak aparat keamanan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh DPC PDI Kota Yogyakarta dalam rangka pembentukan pengurus DPC PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri, tindakan yang ditempuh oleh para pengurus DPC PDI Kota Yogyakarta yakni dengan melakukan segala aktivitas yang berhubungan

⁴⁷ *Wawancara dengan Widi Prartomo, 20 Februari 2001.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dengan kegiatan DPC PDI Kota Yogyakarta secara sembunyi-sembunyi, untuk menghindari tekanan dan pengawasan dari pihak aparat keamanan. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan perbedaan persepsi antara golongan tua dan golongan muda dalam setiap rapat pembentukan struktur organisasi DPC PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri Kota Yogyakarta, yakni dengan jalan melakukan berbagai macam pendekatan terhadap golongan tua dan golongan muda untuk melakukan musyawarah sehingga bisa dicapai kata mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.⁴⁸

Terbentuknya susunan pengurus DPC PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri Kota Yogyakarta, mendapat tanggapan yang positif baik dari para pengurus PAC PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri, para anggota kader PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri Kota Yogyakarta, maupun dari anggota masyarakat. Tetapi meskipun para anggota kader PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri Kota Yogyakarta banyak yang mendukung terbentuknya susunan DPC PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri Kota Yogyakarta tetapi diantara mereka banyak yang tidak berani tampil dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh DPC PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri. Hal ini terjadi karena para pendukung setia Megawati Soekarnoputri mendapat ancaman dari pihak aparat keamanan.

Setelah terjadi perubahan politik yang ditandai dengan adanya pergantian pemimpin di Indonesia. Menjelang pelaksanaan Kongres di Bali pada tahun 1998. Para anggota kader PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri yang dulu sebelum

⁴⁸ *Wawancara Dengan Catur Gono, 20 November 2000.*



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terjadinya reformasi cenderung untuk tidak aktif dengan setiap kegiatan yang diadakan oleh DPC PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri Kota Yogyakarta karena alasan keamanan, tetapi menjelang pelaksanaan Kongres yang akan diselenggarakan di Bali oleh PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri mereka kemudian mulai berani untuk melaksanakan berbagai aktivitas dalam rangka berpartisipasi dalam kegiatan PDI. Ini terbukti dengan didirikannya posko-posko PDI secara swadaya oleh masyarakat, yang di Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 276 buah.⁴⁹

Menjelang pelaksanaan Kongres di Bali, dua orang pengurus DPC PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri yakni Nuryadi dan Catur Gono mendesak agar anggota PDI hasil Kongres Medan yang duduk di kursi DPRD II Kota Yogyakarta untuk mengundurkan diri, karena adanya desakan yang kuat dari dua orang pengurus DPC PDI yang didukung oleh seluruh warga simpatisan DPC PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri Kota Yogyakarta, akhirnya para anggota DPRD II Fraksi PDI (Hasil Kongres Medan) Kota Yogyakarta akhirnya bersedia mengundurkan diri sebagai anggota DPRD II Kota Yogyakarta.

2. Situasi Setelah Pelaksanaan Kongres Bali

Setelah pelaksanaan Kongres di Bali, DPC PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri Kota Yogyakarta, yang telah berganti nama menjadi PDI Perjuangan setelah pelaksanaan, melakukan pemantapan dalam bidang struktur organisasi DPC PDI Perjuangan, dalam hal ini dilakukan pengukuhan para

⁴⁹ *Dokumen Hasil KONFERDA PDI PERJUANGAN DI Yogyakarta Tahun 2000.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pengurus DPC PDI Perjuangan. Para pengurus DPC PDI Perjuangan masih tetap sama seperti para pengurus struktur DPC pada saat dibentuk pada tahun 1996, hanya ada salah seorang ketua DPC PDI Perjuangan yakni Iswantoro, SH., yang mengundurkan diri struktur kepengurusan DPC PDI Perjuangan karena adanya berbagai kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan.⁵⁰

Setelah dilakukan pemantapan terhadap struktur organisasi pengurus DPC PDI Perjuangan, kemudian DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta bersama dengan DPD PDI Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pembaharuan pada Departemen-Departemen yang telah terbentuk pada tahun 1996, pembaharuan ini dilakukan dengan jalan melakukan spesifikasi terhadap Departemen-Departemen yang telah ada, untuk lebih mempermudah dalam menjalankan program-program dari PDI Perjuangan dalam rangka menghadapi pelaksanaan pemilihan umum 1999. Adapun hasil dari susunan Departemen-Departemen tersebut antara lain:

a. Departemen Organisasi

Wakil Ketua DPD yang membidangnya, adalah Santoso (almarhum).

b. Departemen Kaderisasi

Wakil Ketua DPD yang membidangnya, adalah Drs. Katin Subiyantoro.

c. Departemen Politik

Wakil Ketua DPD yang membidangnya, adalah Drs. Sukarno Pranjano.

d. Departemen Pemenangan Pemilihan Umum

Wakil Ketua DPD yang membidangnya, adalah DR. Guno Sumekto.

e. Departemen Pemuda

⁵⁰ Wawancara Dengan Widi Praptomo, 20 Februari 2001.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Wakil Ketua DPD yang membidangnya, adalah DR. Suharyanto.

f. Departemen Pembelaan/Hukum

Wakil Ketua DPD yang membidangnya, adalah R. Suprpto.

g. Departemen Koperasi

Wakil Ketua DPD yang membidangnya, adalah Kamiran.

h. Departemen Kesenian/Kebudayaan

Wakil Ketua DPD yang membidangnya, adalah AL. Sukarno.

i. Departemen Wanita

Wakil Ketua DPD yang membidangnya, adalah Ny. Hetty Subagyo Hadinoto.

j. Departemen Pertimbangan Partai di Daerah (DEPERDA)

Ketua : P. Sumardi

Wakil Ketua : drh. Sukarno

Anggota : Prof. DR. Ismangun

Anggota : Dra. Sri Adiyati Sutarjo

k. Satuan Tugas Pengawasan

Untuk satuan Tugas Pengawasan diketuai oleh R. Suprpto.⁵¹

Menjelang pelaksanaan pemilihan umum 1999, PDI Perjuangan melakukan penggantian lambang partai yang diresmikan oleh Megawati Soekarnoputri pada tanggal 14 Pebruari 1999 di Istora Senayan Jakarta, langkah ini diikuti oleh seluruh DPD dan DPC PDI Perjuangan yang ada di seluruh Indonesia termasuk DPD PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPC

⁵¹ *Dokumen KONFERDA PDI PERJUANGAN DI Yogyakarta, op.cit.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PDI Perjuangan Kota Yogyakarta. Peresmian dan sosialisasi nama dan lambang PDI Perjuangan dilakukan oleh DPD PDI Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 20 Pebruari 1999, oleh Megawati Soekarnoputri di Alun-Alun Utara Kota Yogyakarta.⁵²

Setelah DPD PDI Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan peresmian dan sosialisasi nama dan lambang PDI Perjuangan, maka kemudian DPC PDI Perjuangan juga melakukan peresmian dan sosialisasi terhadap nama dan lambang PDI Perjuangan yang dilakukan di Sekertariat DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta di Jalan Tentara Rakyat Mataram Nomor 17 Badran Yogyakarta, dengan mengundang seluruh jajaran pengurus PAC Kota Yogyakarta.⁵³

Demikianlah pembahasan Bab II tentang Sejarah Terbentuknya PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta, selanjutnya akan dibahas Bab III tentang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Yogyakarta dalam Pemilu 1999.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Wawancara dengan Widi Praptomo, 20 Februari 2001.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DALAM PEMILU 1999 DI KOTA YOGYAKARTA

A. **Persiapan PDI Perjuangan Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 1999 di Kota Yogyakarta.**

PDI Perjuangan merupakan salah satu dari ke-48 partai politik peserta pemilihan umum tahun 1999, yang mempunyai visi dan misi ingin mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur, serta beradab dan berketuhanan.¹

Dalam pemilihan umum 1999 PDI Perjuangan ingin memperoleh suara terbanyak. Usaha yang dilakukan oleh PDI Perjuangan untuk memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan umum 1999, yakni dengan melakukan usaha berupa: persiapan pemilihan umum, pembentukan program kerja, pembentukan panitia pemenangan pemilihan umum, kaderisasi, pendirian posko-posko PDI Perjuangan, pemasangan bendera, pamflet, umbul-umbul bendera, pemilihan tempat kampanye, pemilihan juru bicara kampanye, pemilihan isu-isu yang akan dikemukakan dalam kampanye.²

Langkah pertama yang dilakukan oleh PDI Perjuangan sebelum pelaksanaan pemilihan umum, yakni melakukan penyusunan program kerja partai. Program Kerja PDI Perjuangan, adalah:

1. Mengusahakan pelaksanaan pemilu 1999 bersifat *luber dan jurdil*.

¹ *Dokumen Risalah Kongres Bali 1998.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Mendorong dan mengusahakan terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui kampanye anti korupsi dan penempatan orang-orang yang bersih dari unsur KKN dalam pemerintahan.
3. Mengupayakan terciptanya kesejahteraan rakyat, dengan menciptakan suasana persaingan ekonomi yang diatur oleh Undang-Undang yang bersifat anti monopoli, agar persaingan ekonomi berjalan secara adil, jujur, dan wajar.³

Berdasarkan pada Program Kerja yang telah dibuat tersebut, PDI Perjuangan berupaya untuk mengusahakan terlaksananya Program Kerja Partai. Program Kerja disosialisasikan kepada masyarakat melalui sarana pelaksanaan kampanye PDI Perjuangan di berbagai media dan lewat buku panduan partai.

Menjelang pelaksanaan pemilihan umum 1999, kegiatan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan yakni berupa kegiatan pemilihan kader maupun fungsionaris dilaksanakan melalui seleksi kader dengan penggunaan ADART, adapun syarat untuk menjadi anggota PDI Perjuangan, yaitu:

1. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin.
2. Bersedia mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai lainnya.
3. Setuju dan menerima serta mengamalkan asas ciri, watak dan tujuan partai.
4. Sanggup berperan serta aktif dalam setiap kegiatan partai.

² *Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 1996-2000.*

³ *Kompas, Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi, Strategi dan Program.* Jakarta: PT Gramedia, 1999, hlm. 197-207.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Persiapan lain yang dilakukan oleh PDI Perjuangan menjelang pelaksanaan pemilihan umum yakni melakukan kegiatan kaderisasi. Kegiatan kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dilakukan bersama-sama dengan DPD PDI Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 25 November 1998 dengan materi, sebagai berikut:

1. P-4, Pancasila dan UUD'45.
2. ADART PDI Perjuangan.
3. UU Parpol.
4. UU Pemilu.
5. Kepemimpinan/leadership.⁴

Setelah melakukan kegiatan kaderisasi anggota, PDI Perjuangan juga melakukan penataran terhadap para saksi-saksi di TPS-TPS yang diikuti oleh para saksi TPS PDI Perjuangan se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Persiapan selanjutnya yang dilakukan oleh PDI Perjuangan menjelang pelaksanaan kegiatan kampanye yakni pemilihan juru kampanye dalam kegiatan kampanye. Juru kampanye yang digunakan oleh DPC PDI Kota Yogyakarta yakni juru kampanye dari Pengurus DPP PDI Perjuangan, yakni Soetardjo Suryo Goeritno. Pemilihan Juru Kampanye Tingkat Pusat ini dilakukan untuk menarik minat masyarakat agar ikut bergabung dengan PDI Perjuangan.⁵

Pada saat pelaksanaan kegiatan kampanye, untuk menghadapi masalah keamanan PDI Perjuangan Kota Yogyakarta tidak hanya mengandalkan kekuatan

⁴ *Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 1996-1998, op.cit.*

⁵ *Wawancara dengan Widi Proptomo, Sekertaris II DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, tanggal 24 Pebruari 2001.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dari para petugas keamanan saja, tetapi PDI Perjuangan juga telah mempersiapkan para petugas keamanan, yang berasal dari kader PDI Perjuangan atau Satgas PDI Perjuangan. Untuk Kota Yogyakarta Satgas PDI Perjuangan ini disebut PASANDA, yang dipimpin oleh Subagio. Selain Satgas, PDI Perjuangan Kota Yogyakarta juga memiliki barisan petugas keamanan putri, yakni: barisan Srikandi dan Sarinah yang terdiri dari ibu-ibu dan remaja putri yang bertugas mengawal tamu kehormatan.⁶

B. Pelaksanaan Pemilihan Umum

Pelaksanaan Pemilihan Umum 1999 diawali dengan kegiatan kampanye, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1999- 2 Juni 1999. Kampanye adalah suatu kegiatan individual atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain dalam hal ini masyarakat, agar mau memberikan dukungan (dalam bentuk suara pada pelaksanaan pemilihan umum). Dalam pelaksanaan kegiatan kampanye parpol berusaha untuk menampilkan tema-tema yang bisa menarik masa dengan menampilkan isu-isu yang sedang hangat dibicarakan, supaya anggota masyarakat tertarik dengan program-program yang ditawarkan, sehingga masyarakat pada pelaksanaan pemilihan umum memilih parpol tersebut.⁷

Pada saat pelaksanaan kampanye Panitia Pemilihan Daerah Kota Yogyakarta menetapkan, bahwa dalam satu kali putaran kampanye dilakukan oleh lima parpol sekaligus, hal ini dilakukan mengingat jumlah parpol peserta pemilu 1999, lebih banyak jika dibandingkan dengan waktu pelaksanaan kampanye.

⁶ *Ibid.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Untuk menghindari terjadinya bentrokan antar para pendukung parpol, partai-partai yang memiliki masa banyak dalam melakukan kegiatan kampanye tidak dijadikan satu kelompok dalam melaksanakan kegiatan kampanye.⁸

Pelaksanaan kegiatan kampanye pada pemilihan umum 1999, dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pemasangan pamflet, pemasangan umbul-umbul, bendera parpol, rapat terbuka, rapat tertutup, pawai umum, pawai simpatik, dan pagelaran kesenian. Pada pelaksanaan kegiatan pemasangan umbul-umbul dilakukan pada malam hari (pada pukul 24.00), hal ini dilakukan untuk menghindari bentrokan antar para pendukung parpol.⁹

Pada pelaksanaan pemilihan umum 1999, PDI Perjuangan yang mendapat giliran waktu pelaksanaan kampanye pada tanggal 20 Mei dan 1 Juni 1999, melakukan kegiatan rapat terbuka dan pawai simpatik, dengan menampilkan Soetarjo Suryo Guritno sebagai juru bicara kampanye. Keinginan dari warga masyarakat Kota Yogyakarta yang ingin mewujudkan kondisi yang damai dalam pelaksanaan kegiatan kampanye pemilihan umum 1999, ternyata belum berhasil, ini dibuktikan dengan adanya bentrokan antar para pendukung parpol. Bentrokan antar para pendukung parpol tersebut terjadi pada saat PDI Perjuangan melakukan konvoi kegiatan kampanye pada putaran terakhir di daerah Gamping dan Jalan KH. Ahmad Dahlan diserang oleh sekelompok masa pendukung dari salah satu OPP, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa

⁷ Riswanda Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996, hlm. 143.

⁸ Wawancara dengan Nuryadi, Anggota DPRD II Kota Yogyakarta, tanggal 20 November 2000.

⁹ *Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 1996-1998, op.cit.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pendukung PDI Perjuangan. Bentrokan antar para pendukung partai itu terjadi akibat dari adanya sikap fanatisme dari para pendukung parpol.¹⁰

Keinginan anggota masyarakat untuk mewujudkan suatu pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, diwujudkan dengan adanya partisipasi dari masyarakat yang membentuk kelompok-kelompok pemantau pemilihan umum, seperti : KNIPP, dan Forom Rektorat. Menjelang pelaksanaan pemilihan umum 1999, para anggota masyarakat secara sukarela mendaftarkan diri di tempat-tempat pendaftaran yang telah disediakan dengan menunjukkan identitas diri. Pada saat pelaksanaan teknis pemilihan umum Kota Yogyakarta, yang diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999 di 673 TPS, dan diikuti oleh 246.376 orang pemilih.¹¹

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum 1999, adalah;

1. Adanya dukungan dari anggota masyarakat Kota Yogyakarta yang menginginkan kelancaran pelaksanaan pemilu 1999.
2. Adanya partisipasi warga masyarakat Kota Yogyakarta, yang bersedia menjadi saksi dalam penghitungan suara.
3. Adanya dukungan dari anggota masyarakat yang menginginkan pelaksanaan pemilihan umum 1999, berjalan jujur dan adil, berupa pembentukan Tim Pemantau Pemilu 1999.

Beberapa faktor yang menghambat PDI Perjuangan pelaksanaan pemilihan umum 1999, antara lain:

¹⁰ Wawancara dengan Gunarto, Kader PAC PDI Perjuangan Ranting Cokrokusuman,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Dari segi peralatan, banyak tinta dan kertas suara yang rusak sebelum digunakan.
2. Pada saat pelaksanaan kampanye terjadi bentrokan antar pendukung parpol, karena adanya sikap fanatisme yang berlebihan terhadap partai yang didukungnya.
3. Pada saat pelaksanaan penghitungan suara ada beberapa partai, yang tidak memiliki saksi

C. Hasil Perolehan Suara Pemilu

Pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 1999 di Kota Yogyakarta, ternyata PDI Perjuangan ternyata berhasil memperoleh suara terbanyak, yakni sebesar 95.216 dari jumlah pemilih dalam pelaksanaan pemilihan umum 1999 sebanyak 246.376, dan berhasil mengalahkan perolehan suara dari empat puluh delapan partai politik peserta pemilihan umum, hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum 1999 membuahkan hasil. Hasil-hasil dari perolehan suara pada saat pelaksanaan pemilu adalah:

tanggal 29 Januari 2001.

¹¹ *Dokumen Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kota Yogyakarta.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 3.1

Penghitungan Suara Daerah Tingkat II Kota Yogyakarta Dalam Pemilu Tahun 1999

No	Kecamatan	PARTAI											
		PIB	%	KRISNA	%	PNI	%	PADI	%	KAMI	%	PUI	%
1	Tegalrejo	22	0,11	102	0,52	36	0,18	10	0,05	68	0,35	18	0,09
2	Jetis	10	0,06	93	0,57	44	0,27	7	0,04	42	0,26	12	0,07
3	Gedongtengen	25	0,21	46	0,39	18	0,15	16	0,14	26	0,22	6	0,05
4	Ngampilan	19	0,17	49	0,45	14	0,13	8	0,07	37	0,34	3	0,03
5	Pakualaman	3	0,05	25	0,4	20	0,23	1	0,01	8	0,13	3	0,05
6	Danurejan	8	0,24	59	0,47	44	0,35	2	0,02	20	0,16	3	0,02
7	Gondokusuman	24	0,09	236	0,90	80	0,31	3	0,01	50	0,49	52	0,02
8	Wirobrajan	8	0,05	57	0,39	25	0,17	4	0,03	52	0,35	16	0,11
9	Mantreijeron	18	0,09	62	0,31	49	0,23	24	0,12	84	0,42	11	0,06
10	Kraton	11	0,08	29	0,22	37	0,28	14	0,11	30	0,23	9	0,07
11	Gondomanan	10	0,11	61	0,65	46	0,49	2	0,02	17	0,18	3	0,03
12	Mergangsan	11	0,06	61	0,33	52	0,28	3	0,02	43	0,23	17	0,06
13	Umbulharjo	32	0,1	109	0,33	99	0,3	9	0,03	149	0,45	19	0,06
14	Kotagede	7	0,06	40	0,26	23	0,15	3	0,02	77	0,51	7	0,06
Jumlah Suara		320	0,10	1.021	0,45	587	0,26	106	0,05	703	0,31	179	0,08

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 3.1

No	Kecamatan	PARTAI											
		PKU	%	MASYUMI BARU	%	PPP	%	PSII	%	PDI Perjuangan	%	PAY	%
1	Tegalrejo	19	0,01	21	0,11	939	4,79	10	0,05	8.971	45,78	28	0,14
2	Jetis	5	0,03	9	0,06	720	4,45	13	0,08	7.955	49,05	10	0,06
3	Gedongtengen	9	0,08	6	0,05	539	4,6	4	0,03	6.385	54,48	17	0,15
4	Ngampilan	6	0,06	6	0,05	952	878	2	0,02	3.805	30,50	7	0,06
5	Pakualaman	6	0,09	16	0,25	252	3,99	2	0,03	4.703	30,86	8	0,13
6	Danurejan	12	0,1	9	0,07	686	5,47	9	0,07	5.901	47,03	8	0,06
7	Gondokusuman	65	0,25	8	0,03	838	3,21	20	0,08	11.248	43,11	32	0,12
8	Wirobrajan	13	0,09	12	0,08	804	5,48	12	0,08	5.942	40,53	13	0,09
9	Mantrijeron	12	0,06	18	0,09	1.074	5,38	20	0,10	8.639	43,27	19	0,1
10	Kraton	9	0,07	9	0,07	759	5,72	16	0,12	5.343	40,25	8	0,06
11	Gondomanan	4	0,04	2	0,02	397	4,23	4	0,04	4.283	45,69	11	0,12
12	Mergangsan	9	0,05	15	0,08	1.040	5,07	12	0,07	7.417	40,23	22	0,12
13	Umbulharjo	26	0,08	28	0,08	2.538	7,60	29	0,09	11.890	35,62	25	0,07
14	Kotagede	17	0,11	21	0,14	1.249	8,2	19	0,12	4.703	30,86	13	0,09
Jumlah		212	0,09	180	0,08	12.787	11,42	172	0,08	95.216	42,42	221	0,1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 3.1

NO	Kecamatan	PARTAI											
		PKM	%	PDKB	%	PAN	%	PRD	%	PSII 1905	%	PKD	%
1	Tegalrejo	7	0,04	85	0,43	3.869	19,44	90	0,45	4	0,02	108	0,55
2	Jetis	7	0,04	72	0,44	2.728	16,82	57	0,35	6	0,04	115	0,71
3	Gedongtengen	5	0,05	48	0,41	1.702	14,52	69	0,59	4	0,03	72	0,61
4	Ngampilan	2	0,02	19	0,17	3.323	29,66	53	0,47	6	0,06	125	1,15
5	Pakualaman	2	0,03	29	0,46	1.447	22,90	98	1,55	0	0	55	0,87
6	Danurejan	7	0,06	93	0,74	2.625	20,92	71	0,57	10	0,08	63	0,50
7	Gondokusuman	10	0,04	160	0,61	5.710	21,88	131	1,2	9	0,03	201	0,78
8	Wirobrajan	8	0,05	81	0,55	3.986	27,19	87	0,59	5	0,03	108	0,74
9	Mantrijeron	12	0,06	79	0,4	4.957	24,83	102	0,51	2	0,01	153	0,77
10	Kraton	23	0,17	37	0,28	3.636	27,39	69	0,52	7	0,05	72	0,52
11	Gondomanan	2	0,02	32	0,34	2.606	27,8	54	0,58	3	0,03	45	0,48
12	Mergangsan	16	0,09	134	0,73	4.971	27,10	94	0,51	2	0,01	73	5,26
13	Umbulharjo	21	0,06	155	0,34	9.281	27,80	122	0,37	8	0,02	218	0,37
14	Kotagede	7	0,06	21	0,14	5.026	32,98	60	0,39	6	0,04	32	0,21
Jumlah		129	0,06	1.005	0,44	55.867	24,37	1.157	0,51	72	0,03	1.440	0,63

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 3.1

	Kecamatan	PARTAI											
		PILAR	%	PARI	%	MASYUMI	%	PBB	%	PSP	%	PK	%
1	Tegalrejo	3	0,02	5	0,03	20	0,10	435	2,22	6	0,03	523	2,69
2	Jetis	8	0,05	2	0,01	21	0,13	332	2,05	3	0,02	297	18,34
3	Gedongtengen	2	0,02	3	0,03	19	0,16	102	0,87	2	0,02	137	1,17
4	Ngampilan	0	0	3	0,03	33	0,30	198	10,45	2	0,02	259	2,38
5	Pakualaman	3	0,05	2	0,05	13	0,21	101	1,6	0	0	103	1,63
6	Danurejan	8	0,06	4	0,03	13	0,10	238	1,90	2	0,02	226	1,80
7	Gondokusuman	4	0,02	4	0,02	32	0,12	561	0,04	4	0,02	838	3,21
8	Wirobrajan	2	0,01	2	0,01	27	0,18	334	2,28	2	0,01	362	2,47
9	Mantrijeron	3	0,02	34	0,17	29	0,15	329	1,65	15	0,06	458	2,29
10	Kraton	2	0,02	3	0,02	16	0,12	236	1,78	9	0,07	226	1,70
11	Gondomanan	1	0,01	3	0,03	20	0,21	177	1,89	2	0,02	112	1,19
12	Mergangsan	2	0,01	11	0,06	11	0,06	476	2,60	1	0,01	357	1,95
13	Umbulharjo	12	0,04	8	0,02	65	0,19	997	2,38	9	0,03	883	2,65
14	Kotagede	3	0,02	6	0,04	35	0,23	262	1,72	1	0,01	446	2,93
Jumlah		54	0,02	90	0,04	362	0,16	4.778	2,1	58	0,03	5.227	2,3

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 3..1

No	Kecamatan	PARTAI									
		PNU	%	PNI Front Marheinis	%	IPKI	%	P. REPUBLIK	%	PID	%
1	Tegalrejo	27	0,14	30	0,15	33	0,17	8	0,04	2	0,01
2	Jetis	12	0,07	61	0,38	32	0,2	15	0,09	2	0,01
3	Gedongtengen	23	0,2	37	0,32	21	0,18	1	0,01	4	0,03
4	Ngampilan	11	0,10	15	0,14	13	0,12	3	0,22	4	0,04
5	Pakualaman	2	0,03	21	0,33	8	0,13	1	0,01	1	0,01
6	Danurejan	16	0,13	43	0,34	25	0,2	18	0,14	11	0,09
7	Gondokusuman	20	0,08	85	0,33	29	0,11	27	0,10	13	0,05
8	Wirobrajan	30	0,20	52	0,35	27	0,18	17	0,12	3	0,02
9	Mantrijeron	45	0,23	32	0,16	31	0,16	17	0,09	7	0,04
10	Kraton	6	0,05	33	0,25	47	0,25	16	0,12	7	0,04
11	Gondomanan	5	0,05	12	0,13	8	0,09	6	0,06	2	0,02
12	Mergangsan	10	0,05	41	0,22	29	0,16	11	0,06	7	0,04
13	Umbulharjo	24	0,07	69	0,21	62	0,21	37	0,11	6	0,02
14	Kotagede	7	0,06	20	0,13	30	0,2	10	0,07	3	0,02
Jumlah		238	0,10	551	0,24	395	0,17	187	0,08	68	0,03

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 3.1

No	Kecamatan	PARTAI											
		PNI Masa Marhein	%	MURBA	%	PDI	%	GOLKAR	%	PP	%	PKB	%
1	Tegalrejo	18	0,09	2	0,01	37	0,19	2.415	12,32	51	0,26	1.241	6,33
2	Jetis	16	0,1	0	0	31	0,19	2.158	13,31	33	0,20	914	5,64
3	Gedongtengen	25	0,21	1	0,01	17	0,15	1.529	13,05	31	0,26	535	4,57
4	Ngampilan	11	0,10	24	0,22	10	0,09	1.248	11,45	28	0,26	402	3,69
5	Pakualaman	3	0,05	1	0,01	4	0,06	756	11,97	12	0,19	226	3,58
6	Danurejan	19	0,15	2	0,02	12	0,1	1.333	10,62	37	0,29	665	5,3
7	Gondokusuman	20	0,08	1	0,01	31	0,12	3.558	13,64	57	0,22	1.332	5,10
8	Wirobrajan	17	0,12	2	0,01	23	0,16	1.595	10,88	38	0,26	621	4,24
9	Mantrijeron	23	0,12	3	0,02	21	0,11	2.181	10,92	39	0,2	1.087	5,44
10	Kraton	20	0,15	3	0,02	22	0,17	1.570	11,83	29	0,22	655	4,93
11	Gondomanan	12	0,13	5	0,05	15	0,16	880	9,39	20	0,21	226	3,58
12	Mergangsan	17	0,09	11	0,06	23	0,13	2.111	11,51	46	0,25	794	4,33
13	Umbulharjo	44	0,13	10	0,03	50	0,15	3.592	10,76	103	0,31	2.006	6,01
14	Kotagede	18	0,19	3	0,02	22	0,14	1.807	11,86	30	0,2	920	6,04
Jumlah		256	0,11	68	0,03	318	0,14	26.763	11,42	554	0,24	11.670	4,86

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 3.1

No	kecamatan	PARTAI											
		PUDI	%	PBN	%	MKGR	%	PDR	%	P.CINTA DAMAI	%	PKP	%
1	Tegalrejo	16	0,08	9	0,05	12	0,06	13	0,07	56	0,29	164	0,84
2	Jetis	25	0,15	4	0,02	7	0,04	18	0,11	20	0,12	173	1,31
3	Gedongtengen	18	0,6	5	0,04	23	0,02	7	0,06	15	0,13	76	0,65
4	Ngampilan	6	0,06	6	0,06	6	0,06	7	0,06	17	0,16	113	1,04
5	Pakualaman	6	0,09	1	0,01	7	0,11	1	0,01	5	0,08	40	0,63
6	Danurejan	14	0,11	5	0,04	10	0,08	18	0,14	28	0,22	100	0,8
7	Gondokusuman	34	0,13	18	0,07	14	0,05	56	0,21	37	0,14	244	0,94
8	Wirobrajan	18	0,12	4	0,03	16	0,11	18	0,23	30	0,20	109	0,74
9	Mantrijeron	25	0,13	3	0,02	14	0,07	14	0,07	20	0,10	375	1,88
10	Kraton	20	0,15	5	0,04	17	0,13	13	0,13	14	0,11	139	1,05
11	Gondomanan	11	0,12	3	0,03	6	0,06	7	0,07	30	0,32	96	1,04
12	Mergangsan	29	1,16	4	0,02	17	0,09	9	0,05	22	0,12	180	0,98
13	Umbulharjo	53	0,16	15	0,04	38	0,11	40	0,12	66	0,2	288	0,86
14	Kotagede	20	0,13	13	0,09	13	0,09	13	0,09	30	0,2	120	0,79
Jumlah		295	0,13	95	0,04	200	0,09	234	0,10	390	0,17	2,217	0,97

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 3.1

NO	Kecamatan	PARTAI											
		SPSI	%	PNBI	%	PBI	%	P. SUNI	%	PND	%	PUMI	%
1	Tegalrejo	5	0,03	12	0,06	19	0,1	7	0,04	2	0,01	1	0,01
2	Jetis	5	0,03	14	0,09	64	0,39	25	0,15	7	0,04	1	0,01
3	Gedongtengen	1	0,01	11	0,09	74	0,63	1	0,01	4	0,03	1	0,01
4	Ngampilan	3	0,03	6	0,09	16	0,15	4	0,04	2	0,02	2	0,02
5	Pakualaman	0	0	7	0,11	8	0,13	1	0,01	1	0,01	4	0,06
6	Danurejan	2	0,02	9	0,07	17	0,14	1	0,01	9	0,07	1	0,01
7	Gondokusuman	8	0,03	32	0,12	64	0,25	6	0,02	9	0,03	27	0,10
8	Wirobrajan	8	0,05	29	0,2	17	0,12	1	0,01	7	0,05	1	0,01
9	Mantrijron	7	0,04	28	0,14	25	0,13	5	0,03	6	0,03	5	0,03
10	Kraton	7	0,04	16	0,12	6	0,05	4	0,03	8	0,06	4	0,04
11	Gondomanan	3	0,03	8	0,09	68	0,73	2	0,02	3	0,03	2	0,02
12	Mergangsan	3	0,02	46	0,25	34	0,19	5	0,03	5	0,03	2	0,01
13	Umbulharjo	8	0,02	74	0,22	18	0,05	12	0,04	17	0,05	5	0,01
14	Kotagede	5	0,03	30	0,2	10	0,07	7	0,06	2	0,01	2	0,01
Jumlah		65	0,03	322	0,14	440	0,19	81	0,04	95	0,04	52	0,02

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 3.1

no	Kecamatan	PARTAI		Jumlah TPS	Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih	Jumlah Suara (Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih)	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Penduduk yang tidak menggunakan hak pilih
		PPI	%						
1	Tegalrejo	10	0,05	48	7.186	19.837	19.098	248	1.201
2	Jetis	12	0,07	54	17.397	16.469	16.217	252	928
3	Gedongtengen	3	0,03	27	12.583	11.906	11.718	188	667
4	Ngampilan	3	0,03	36	11.634	11.097	10.895	202	537
5	Pakualaman	4	0,06	29	6.705	6.422	6.318	104	283
6	Danurejan	10	0,08	37	13.556	12.729	12.548	181	827
7	Gondokusuman	22	0,08	96	29.611	26.436	26.094	242	3.175
8	Wirobrajan	11	0,08	46	15.849	14.904	14.659	242	945
9	Mantrijerobn	23	0,12	57	21.338	20.206	19.965	241	1.132
10	Kraton	6	0,05	47	14.143	13.542	13.273	269	601
11	Gondomanan	10	0,11	33	9.885	9.511	9.375	136	374
12	Mergangsan	14	0,08	65	19.871	18.615	18.342	237	1.256
13	Umbulharjo	52	0,16	77	36.427	33.837	33.381	492	2.554
14	Kotagede	21	0,14	31	16.339	15.508	115.240	268	831
Jumlah		207	0,09	673	246.376	231.055	227.614	3.441	15.321

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 1999.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 3.2
Jumlah Perolehan Suara Lima Partai Besar Pemenang Pemilihan Umum 1999 Di Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	PARTAI									
		PDI Perjuangan	%	PAN	%	GOLKAR	%	PPP	%	PKB	%
1	Tegalrejo	8.971	45,78	3.896	16,82	2.415	12,32	939	4,79	1.241	6,33
2	Jetis	7.955	49,05	2.728	16,82	2.158	13,31	720	4,45	914	5,64
3	Gedongtengen	6.354	54,48	1.702	14,52	1.529	13,05	539	4,6	535	4,57
4	Ngampilan	3.805	30,50	3.323	29,66	1.248	11,45	952	8,74	402	3,69
5	Pakualaman	3.004	47,55	1.447	22,90	756	11,97	252	8,74	226	3,58
6	Danurejan	5.901	47,03	2.625	20,92	1.333	10,62	686	5,47	665	5,3
7	Gondokusuman	11.248	43,11	5.170	21,88	3.558	13,64	838	3,21	1.332	5,10
8	Wirobrajan	5.942	40,43	3.986	27,19	1.595	10,88	804	5,48	621	4,24
9	Mantrijeron	8.369	43,27	4.957	24,83	2.181	10,92	1.074	5,38	1.087	5,44
10	Kraton	5.343	40,25	3.636	27,39	1.570	11,83	759	5,72	655	4,93
11	Gondomanan	4.283	45,69	2.606	27,8	880	9,39	379	4,23	272	2,90
12	Mergangsan	7.414	40,23	4.971	27,10	2.111	11,51	1.040	5,07	794	4,33
13	Umbulharjo	11.890	35,62	9.281	27,80	3.592	10,76	2.538	7,60	2.006	6,01
14	Kotagede	6.703	30,86	5.026	32,98	1.870	11,86	1.249	8,2	920	6,04
Jumlah		95.216	42,42	55.867	24,37	26.763	11,67	12.787	4,94	11.760	4,86

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 1999.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan dari hasil perolehan suara PDI Perjuangan pada pelaksanaan pemilihan umum 1999, seperti yang terlihat pada tabel 3.1 dan 3.2 PDI Perjuangan ternyata berhasil memperoleh suara terbanyak, yakni sebesar 95.216 dari 246.376 orang pemilih.

PDI Perjuangan berhasil memperoleh kemenangan dalam perolehan suara pemilu 1999, di beberapa daerah yang merupakan basis PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta, yakni: Gedongtengen, Jetis, Tegalrejo, Pakualaman, Danurejan, Gondomanan, Mantrijeron, Gondokusuman, Kraton, Wirobrajan dan Mergangsan. Kemenangan perolehan suara PDI Perjuangan terbesar terjadi di daerah Gedongtengen, yakni sebesar 54,48%. PDI Perjuangan memang di beberapa daerah mendapatkan suara mayoritas dalam pelaksanaan pemilu, tetapi di daerah Kotagede yang merupakan basis masa Muhammadiyah, PDI Perjuangan mengalami kekalahan dalam hal perolehan suara dari PAN.

Hasil yang perolehan suara PDI Perjuangan pada pelaksanaan pemilihan umum, tidak bisa lepas begitu saja dari beberapa faktor yang mendukung kemenangan perolehan suara PDI Perjuangan kota Yogyakarta pada pelaksanaan pemilihan umum 1999. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kemenangan perolehan suara PDI Perjuangan dalam pelaksanaan pemilihan umum 1999 di Kota Yogyakarta, adalah:

Figur Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI yang memiliki kharisma tersendiri dari mendiang ayahnya Ir. Soekarno, pada pelaksanaan pemilihan umum 1999 ia dicalonkan menjadi Capres RI, sehingga

¹⁴ *Dokumen Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kota Yogyakarta, op.cit.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dengan adanya kharisma yang dimiliki oleh Megawati Soekarnoputri sebagai putri Bung Karno, maka Ia mendapat dukungan dari masyarakat luas pada pelaksanaan pemilihan umum 1999.

PDI Perjuangan dianggap sebagai simbol perlawanan rakyat, dan partai yang tertindas pada masa pemerintahan orde baru, sehingga banyak anggota masyarakat yang bersimpati pada PDI Perjuangan.

Keberhasilan dari PDI Perjuangan sebagai mengidentikkan sebagai partainya “wong cilik”, sehingga dalam pelaksanaan pemilihan umum mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat luas, terutama dari golongan masyarakat kelas bawah dan golongan masyarakat yang merasa dirugikan pada masa pemerintahan orde baru.

Keberhasilan dari PDI Perjuangan yang mengidentikkan sebagai partai yang tidak membedakan ras, usia, agama dan tingkatan ekonomi, sehingga banyak anggota masyarakat yang mendukung PDI Perjuangan pada pelaksanaan pemilihan umum 1999.

Faktor-faktor yang menghambat kemenangan PDI Perjuangan Kota Yogyakarta pada pelaksanaan Pemilihan Umum 1999, adalah:

Management partai lemah di tingkat DPD, DPC, PAC, Ranting, dan Anak Ranting karena dikelola dengan bakat alam, serta kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dari para pengurus PDI Perjuanga.

Selain sebagai basis dari PDI Perjuangan, Kota Yogyakarta juga dikenal sebagai basis dari PAN, hal ini tentu saja mengurangi jumlah perolehan suara PDI

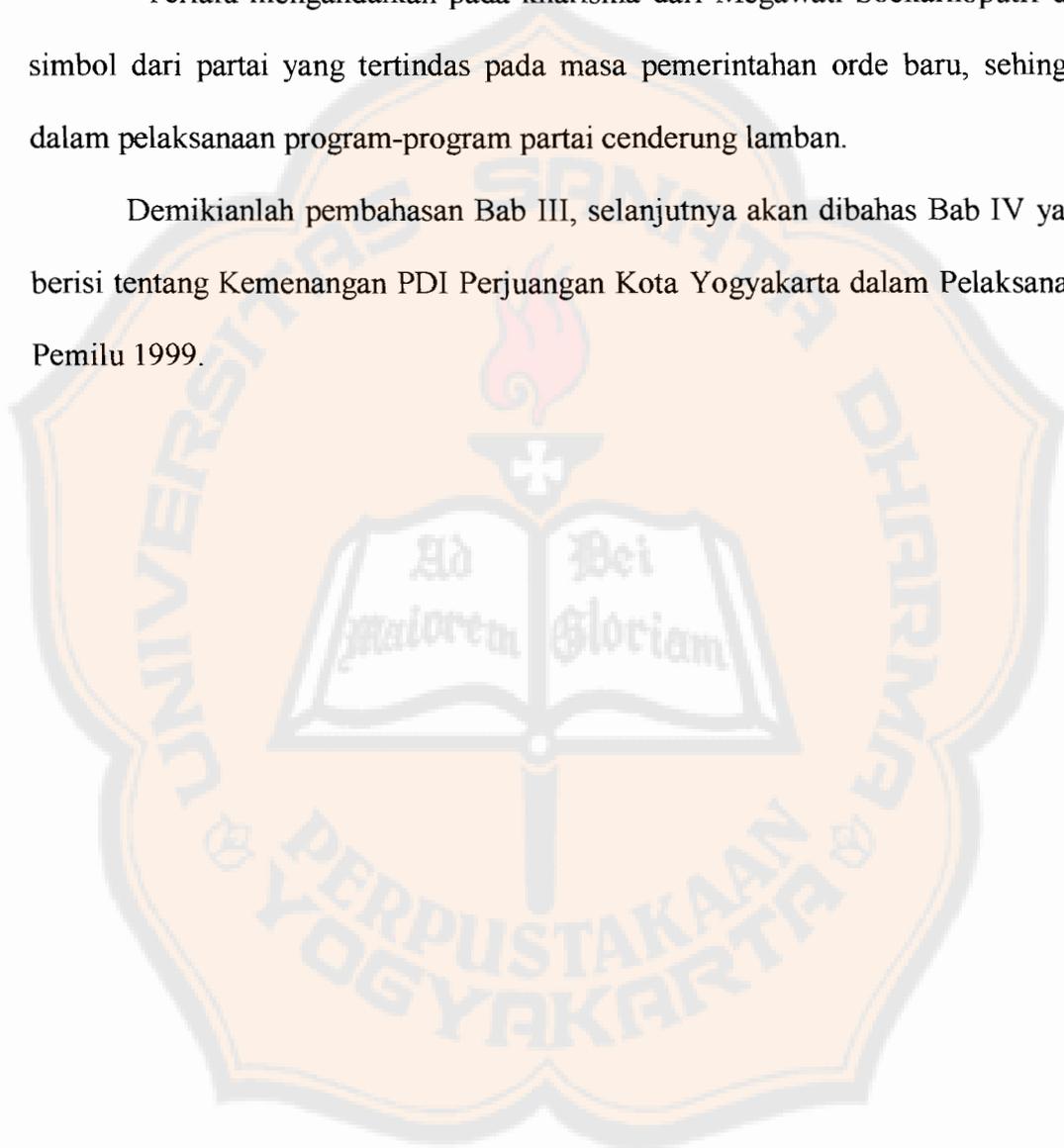
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Perjuangan, ini terbukti dengan adanya kekalahan perolehan suara PDI Perjuangan dari PAN di daerah kecamatan Kotagede.

Pemahaman atau ketaatan terhadap ADART masih kurang sehingga banyak terjadi masalah intern partai.

Terlalu mengandalkan pada kharisma dari Megawati Soekarnoputri dan simbol dari partai yang tertindas pada masa pemerintahan orde baru, sehingga dalam pelaksanaan program-program partai cenderung lamban.

Demikianlah pembahasan Bab III, selanjutnya akan dibahas Bab IV yang berisi tentang Kemenangan PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dalam Pelaksanaan Pemilu 1999.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV

KEMENANGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMILU 1999

A. Faktor-faktor yang Mendorong PDI Perjuangan Menang Dalam Pemilu 1999

I. Keadaan Geografis dan Status Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pelajar

Daerah Tingkat II Kota Yogyakarta merupakan suatu wilayah yang terletak di tengah-tengah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Sleman;

sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Bantul;

sebelah telatan : berbatasan dengan Kabupaten Bantul;

sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Bantul.¹

Letak Kota Yogyakarta yang strategis yakni berada di Ibukota Propinsi DIY membawa keberuntungan bagi Kota Yogyakarta, hal ini terjadi karena sebagai ibukota Propinsi Kota Yogyakarta menjadi pusat kegiatan dari kehidupan masyarakat, seperti pusat kegiatan ekonomi, pendidikan dan politik. Sebagai pusat kegiatan ekonomi, pendidikan dan politik Kota Yogyakarta berdampak pada penambahan jumlah penduduk, sebagai akibat dari adanya urbanisasi. Urbanisasi yang terjadi di Kota Yogyakarta, mengakibatkan terjadinya kepadatan jumlah penduduk kota Yogyakarta dan tingkat penggunaan lahan sebagai perumahan

¹ BPS, *Kota Yogyakarta Dalam Angka 1999*. BPS Kota Yogyakarta, 2000, hlm. 1.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang tinggi di berbagai wilayah seperti Ngampilan, Wirobrajan, Mantrijeron dan Kraton. Kepadatan jumlah penduduk Kota Yogyakarta tersebut selain adanya faktor urbanisasi juga karena status dari Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar. Sebagai Kota pelajar, Kota Yogyakarta merupakan tujuan utama bagi pelajar dari berbagai daerah lain di Indonesia yang ingin menimba ilmu di Yogyakarta.

Dilihat dari segi letak maupun posisi Kota Yogyakarta sebagai Pusat pemerintahan Daerah Istimwa Yogyakarta, dan status yang disandang oleh Kota Yogyakarta sebagai Kota pelajar, maka hal ini akan membawa pengaruh perolehan suara pada pelaksanaan pemilu 1999. Pengaruh tersebut muncul dalam hal jumlah anggota masyarakat yang menggunakan hak pilihnya di Kota Yogyakarta, yakni sebesar 246.376 orang, dan pada proses penghitungan suara pemilu 1999, ternyata dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Kemenangan yang diperoleh oleh PDI Perjuangan tersebut, selain karena kota Yogyakarta merupakan basis dari PDI Perjuangan juga karena status kota Yogyakarta sebagai Kota pelajar, maka masyarakat di kota Yogyakarta dinilai lebih rasional dalam menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilu tahun 1999 lalu yakni dengan memilih partai yang dinilai memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang pada masa pemerintah Orde Baru terkesan diabaikan.

Wilayah kota Yogyakarta dibagi menjadi 14 wilayah kecamatan dan 45 Kelurahan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-263 Tahun 1981, tentang pembentukan kelurahan-kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.² Untuk mengetahui lebih lanjut tentang banyaknya

² BPS, *Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 1999*. BPS Kota Yogyakarta, hlm. 23

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kecamatan dan kelurahan di kota Yogyakarta serta luas wilayah dari tiap wilayah, dipersilahkan untuk melihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
BANYAKNYA KECAMATAN DAN KELURAHAN DIRINCI
MENURUT LUAS WILAYAH, JUMLAH RW DAN RT TAHUN 1999

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah RW	Jumlah RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. MANTRUJERON	3	2,61	55	230
2. KRATON	3	1,40	43	175
3. MERGANGSAN	3	2,31	60	219
4. UMBULHARJO	7	8,12	80	318
5. KOTAGEDE	3	3,07	40	161
6. GONDOKUSUMAN	5	3,99	65	276
7. DANUREJAN	3	1,10	43	160
8. PAKUALAMAN	2	0,63	19	84
9. GANDOMANAN	2	1,12	31	110
10. NGAMPILAN	2	0,82	21	120
11. WIROBRAJAN	3	1,76	34	165
12. GEDONGTENGEN	2	0,96	44	163
13. JETIS	3	1,70	36	168
14. TEGALREJO	4	2,91	46	183
Jumlah	45	32,50	615	2.532

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 1999.³

Berdasarkan data dari tabel 4.1 tentang luas wilayah kota Yogyakarta, dilihat dari luas wilayah perkecamatan, maka akan tampak jelas bahwa wilayah kecamatan Umbulharjo merupakan wilayah yang paling luas di Kota

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Yogyakarta. Umbulharjo merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kota Yogyakarta yang terdiri dari tujuh buah kelurahan, 80 RW dan 318 RT dengan luas areal 8,12 Km². Sedangkan jika kita melihat jumlah penggunaan lahan untuk perumahan paling padat yakni di daerah Ngampilan, yakni sebanyak 80 % dari luas wilayahnya digunakan untuk perumahan.

Pembagian wilayah menjadi beberapa kecamatan pada setiap pelaksanaan pemilu digunakan sebagai tolok ukur dari kekuatan dari parpol peserta pemilu. Melalui hasil perolehan suara pada pemilu dapat ditentukan suara mayoritas dari parpol di setiap wilayah kecamatan, yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk pembuatan peta politik untuk menentukan basis-basis salah satu parpol disuatu kecamatan tertentu. Pembuatan peta kekuatan politik perwilayah kecamatan tersebut berguna bagi aparat keamanan untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan antar pendukung parpol pada dalam setiap pelaksanaan kegiatan kampanye pihak aparat keamanan bisa mengantisipasi bentrokan antar pendukung parpol pada saat salah satu parpol sedang melakukan kegiatan konvoi yang melintasi wilayah kecamatan yang merupakan basis dari parpol lain.

Pada pelaksanaan pemilu 1999 lalu, PDI Perjuangan merupakan salah satu parpol pemenang pemilu di Kota Yogyakarta, yakni sebanyak 42,42 %. Untuk mengetahui kemenangan PDI Perjuangan penulis persilahkan untuk melihat pada tabel 3.2 pada halaman 71. Kemenangan PDI Perjuangan sebanyak 42,42% dapat dipastikan bahwa sebagian besar kecamatan yang terletak di Kota Yogyakarta merupakan basis PDI Perjuangan. Basis-basis dari PDI Perjuangan antara lain

³ *Ibid.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berada di wilayah Kecamatan Gedongtengen, Tegalrejo, Jetis, Pakualaman, Gondomanan, Wirobrajan, Mantrijeron, Kraton, Danurejan, dan Mergangsan

Kecamatan-kecamatan yang menjadi basis PDI Perjuangan sebagian merupakan sentral dari kegiatan perekonomian di Kota Yogyakarta, seperti; Kecamatan Gedongtengen dan Gondomanan merupakan sentral dari kegiatan perekonomian di Kota Yogyakarta. Hal ini tampak dari jenis pekerjaan yang ditekuni oleh sebagian besar dari penduduk di kawasan kecamatan Gedongtengen dan Gondomanan, yang mengandalkan pada sektor perdagangan dan perhotelan. Disamping sebagai pusat perekonomian di kawasan tersebut sebagian besar penduduknya merupakan WNI Keturunan Cina. Dengan jumlah penduduk yang sebagian besar merupakan WNI Keturunan Cina, maka pada pelaksanaan pemilu 1999, mereka cenderung untuk memilih partai yang bersifat demokratis dan tidak memihak pada salah satu aliran agama tertentu. Adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pada pelaksanaan pemilu 1999 sebagian besar penduduk di kedua wilayah tersebut memilih PDI Perjuangan.

Untuk wilayah Kecamatan Mantrijeron, Danurejan, Kraton, dan Mergangsan merupakan daerah Industri, dimana sebagian besar penduduknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bekerja dibidang industri, terutama di bidang industri yang berhubungan dengan pariwisata, seperti; industri batik dan *handy craft*. Disamping itu, penduduk yang tinggal di wilayah tersebut bersifat heterogen dan menginginkan kehidupan yang lebih baik, maka pada saat pelaksanaan pemilu 1999, daerah-daerah tersebut memilih PDI Perjuangan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Wilayah Kecamatan Jetis, Tegalrejo dan Wirobrajan merupakan basis dari PDI Perjuangan. Daerah tersebut merupakan basis dari PDI Perjuangan, karena lokasi daerah tersebut selain berada di pusat Kota Yogyakarta, juga merupakan daerah yang wilayahnya dekat dengan beberapa Perguruan Tinggi di DIY, sehingga sebagian besar penduduknya merupakan kelompok Mahasiswa dan Pelajar, maka pada pelaksanaan pemilu 1999 yang lalu sebagian besar dari mereka memilih partai yang dianggap menegakkan nilai-nilai demokrasi.

II. Keadaan Sosial Masyarakat Kota Yogyakarta

Keadaan sosial masyarakat adalah suatu gambaran tentang kondisi sosial dari suatu masyarakat di wilayah tertentu, yang ditinjau dari jumlah penduduk, jenis kelamin dan status kewarganegaraan dari penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Keadaan sosial dari suatu wilayah pada pelaksanaan pemilu, dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dan tolok ukur dari suatu parpol peserta pemilu untuk mendapatkan dukungan perolehan suara.

Penduduk kota Yogyakarta dilihat dari tabel 4.2 sebanyak 490.433 jiwa, yang terdiri dari 489.309 WNI dan 1.124 WNA. Dari paparan data 2.2 WNA terbanyak berada di wilayah kecamatan Gedongtengen.⁴ WNA yang tinggal di kota Yogyakarta sebagian besar adalah warga negara Cina dan India, sebagian besar telah menjadi WNI dan sebagian lagi masih berstatus WNA. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang jumlah penduduk Kota Yogyakarta menurut

⁴ *Ibid*, hlm. 28.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Status Kewarganegaraan di wilayah kota Yogyakarta, dipersilahkan untuk membaca tabel 4.2.

Tabel 4.2

BANYAKNYA PENDUDUK KOTA YOGYAKARTA MENURUT KEWARGANEGARAAN KEADAAN AKHIR TAHUN 1999

Kecamatan	Jumlah penduduk		Jumlah
	WNI	WNA	
1. Mantrijeron	19.326	2	38.391
2. Kraton	15.911	-	31.323
3. Mergangsan	21.382	5	40.553
4. Umbulharjo	32.803	18	63.346
5. Kotagede	13.576	-	27.055
6. Gondokusuman	37.800	33	71.442
7. Danurejan	16.004	8	30.109
8. Pakualaman	7.053	16	14.472
9. Gondomanan	10.677	148	20.363
10. Ngampilan	228.532	41	22.875
11. Wirobrajan	16.068	24	29.484
12. Gedongtengen	25.708	330	26.036
13. Jetis	37.184	15	37.335
14. Tegalrejo	37.601	46	37.647
Jumlah	489.309	1.124	490.443

Sumber : Kota Yogyakarta dalam Angka Tahun 1999.⁵

⁵ *Ibid.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

WNA yang tinggal di Kota Yogyakarta sebagian besar adalah Warga Negara Cina dan India. Sebagian besar dari WNA tersebut telah menjadi WNI dan sebagian lagi masih berstatus sebagai WNA.

Masing-masing wilayah kecamatan di Kota Yogyakarta memiliki potensi perkembangan ekonomi, misalnya untuk kecamatan Gedongtengen yang berada di kawasan Malioboro merupakan sentral dari kegiatan perdagangan, dan jasa perhotelan, daerah kecamatan Kraton, Matrijeron dan Mergangsan merupakan sentral industri dan batik, sedangkan daerah kecamatan Kotagede merupakan sentral Industri dan perdagangan perak dan konveksi. Alasan dari WNA lebih memilih untuk tinggal di wilayah kecamatan Gedongtengen karena wilayah tersebut merupakan pusat kegiatan perekonomian dari Daerah Istimewa Yogyakarta yakni berada di sekitar kawasan Malioboro, disamping itu letak wilayah kecamatan Gedongtengen dekat dengan pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaksanaan pemilu tahun 1999 ternyata membawa pengaruh terhadap perubahan jumlah Penduduk di Kota Yogyakarta, untuk lebih jelasnya dipersilahkan untuk melihat data 4.3 Mutasi Penduduk Kota Yogyakarta Pada tahun 1999.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 4.3

**MUTASI PENDUDUK DI KOTA YOGYAKARTA MENURUT
KECAMATAN SELAMA TAHUN 1999**

Kecamatan	Penduduk awal Januari	Lahir	Datang	Pergi	Mati	Penduduk akhir Desember
1. Manteijeron	37.995	446	785	561	274	38.391
2. Kraton	31.045	331	521	392	182	31.323
3. Mergangsan	39.954	383	985	549	220	40.553
4. Umbulharjo	61.417	824	2.221	825	291	63.346
5. Kotagede	26.439	338	723	331	114	27.055
6. Gondokusuman	70.543	300	2.076	1.308	169	71.442
7. Danurejan	29.827	289	692	512	187	30.109
8. Pakualaman	14.421	148	723	230	104	14.427
9. Gondomanan	20.360	197	385	366	213	20.363
10. Ngampilan	22.675	264	511	432	143	22.875
11. Wirobrajan	29.017	376	715	447	177	29.484
12. Gedongtengen	25.928	287	454	453	178	26.038
13. Jetis	37.142	343	724	672	202	37.335
14. Tegalrejo	36.997	416	939	509	196	37.647
Jumlah	483.760	4.942	11.968	7.587	2.650	590.443
Tahun 1998	478.752	5.080	10.706	8.199	2.579	483.760

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 1999.⁶

Perubahan jumlah penduduk yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta menjelang Pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 1999, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 1998 kota Yogyakarta mengalami jumlah

⁶ *Ibid.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penduduk. Peningkatan jumlah penduduk Kota Yogyakarta menjelang pelaksanaan pemilu 1999, disebabkan karena Kota Yogyakarta dinilai oleh sebagian besar penduduk Indonesia sebagai daerah yang relatif aman jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia semenjak adanya peristiwa kerusuhan pada tahun 1998. Status Kota Yogyakarta yang dinilai sebagai daerah yang relatif aman, maka menjelang pelaksanaan pemilihan umum tahun 1999 karena adanya kekawatiran terjadinya kerusuhan, maka banyak anggota masyarakat dari beberapa wilayah Indonesia melakukan mutasi di Kota Yogyakarta.⁷

Pada pelaksanaan pemilu 1999 di Kota Yogyakarta dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Kemenangan PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; karena Kota Yogyakarta sebagai basis dari PDI Perjuangan, juga karena status Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar, maka masyarakat Kota Yogyakarta bersifat rasional dalam memberikan aspirasinya pada parpol yang dinilai lebih menyuarakan aspirasi rakyat dan nilai nilai demokrasi. Penduduk Kota Yogyakarta yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari sektor perdagangan yang dalam susunan struktur masyarakat Kota Yogyakarta termasuk golongan ketiga lebih memilih PDI Perjuangan dalam pemilu 1999, karena dalam program-programnya mencantumkan upaya penyelenggaraan perekonomian yang bersifat adil.

⁷ Wawancara dengan Joni Pegawai BPS Kota Yogyakarta, 27 Februari 2001.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

III. Kondisi Politik Kota Yogyakarta Pada Tahun 1999

Dinamika kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta menjelang pelaksanaan pemilu 1999 bernuansa demokratis. Hal ini terpengaruh status Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan, Kota Budaya, dan Kota Pariwisata yang membawa pengaruh atau paham-paham demokratis.

Susunan struktur sosial masyarakat Kota yang terdiri dari: Keluarga Raja, Walikota Yogyakarta, PNS/ ABRI, Wirasaswasta/ karyawan Swasta dan Buruh/Tani, ternyata lebih bersifat terbuka untuk menerima paham-paham atau pengaruh dari proses modernisasi. Para pelajar dan mahasiswa yang berada di Kota Yogyakarta ternyata telah membawa masuknya paham-paham baru tentang proses modernisasi yang menciptakan proses demokratisasi di wilayah Kota Yogyakarta. Perwujudan dari proses demokratisasi yakni terciptanya sebuah pemilu yang jujur dan adil, serta bersifat langsung umum, bebas dan rahasia di Kota Yogyakarta.

Menjelang pelaksanaan pemilihan umum 1999, Kota Yogyakarta mulai memperlihatkan berbagai aktivitas politik. Hal ini nampak di daerah-daerah yang merupakan basis-basis dari parpol peserta pemilu, maupun di tempat-tempat strategis di Pusat Kota Yogyakarta, yakni di sepanjang jalan Protokol di Kota Yogyakarta. Berbagai aktifitas yang dilakukan oleh warga Kota Yogyakarta yang merupakan pendukung dari salah satu parpol peserta pemilu menjelang pelaksanaan pemilu, antara lain: secara sukarela memasang bendera, umbul-umbul, pamflet, dan poster dari partai yang di dukungnya di tempat-tempat strategis, yang berisikan himbauan dan ajakan untuk memilih parpol tersebut.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Di daerah yang merupakan basis PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, menjelang pelaksanaan pemilihan umum tampak meriah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aktifitas para kader dan simpatisan PDI Perjuangan, yang secara sukarela mendirikan posko-posko PDI Perjuangan di beberapa tempat yang dinilai strategis, seperti di ujung Gang dan di sepanjang jalan Kota Yogyakarta. Selain pembangunan posko PDI Perjuangan, para pendukung PDI Perjuangan juga melakukan pemasangan umbul-umbul, pamflet, bendera dan poster yang berisi ajakan pada para anggota masyarakat untuk memilih PDI Perjuangan pada pelaksanaan pemilu 1999.

Adanya berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh para pendukung parpol peserta pemilu 1999 di Kota Yogyakarta selama masa kampanye, semakin meningkatkan suhu politik di wilayah Kota Yogyakarta. Peningkatan suhu politik Kota Yogyakarta berkaitan dengan kegiatan kampanye tersebut, nampak dari adanya berbagai konflik-konflik yang timbul antar pendukung partai. Konflik antar pendukung partai tersebut terjadi karena adanya sikap fanatisme dari para pendukung parpol yang berlebihan. Konflik antar pendukung parpol pada pelaksanaan pemilu 1999, yakni antara pendukung PDI Perjuangan dengan salah para pendukung salah satu parpol Islam di daerah Jalan KH. Ahmad Dahlan.⁸

IV. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Yogyakarta

Keadaan sosial ekonomi masyarakat adalah suatu gambaran tentang kondisi sosial ekonomi dari masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu dilihat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dari jenis pekerjaan dan penghasilan, serta tingkat penyebaran sumber daya ekonomi dilihat dari tingkat kesejahteraan keluarga. Keadaan sosial ekonomi masyarakat tersebut, pada pelaksanaan pemilu dipergunakan oleh parpol peserta pemilu sebagai gambaran, dari golongan ekonomi mana saja yang mendukung partainya dalam pelaksanaan pemilu.

Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 32,50 Km², dan dengan jumlah penduduk sekitar 490.433. Pembangunan bidang ekonomi di Kota Yogyakarta lebih diarahkan bidang perdagangan, pendidikan, industri, jasa dan pariwisata. Bidang lain yang juga menjadi target pembangunan ekonomi pemerintah Kota Yogyakarta yakni perbaikan jalan, listrik dan jasa keuangan.

Sektor perdagangan menjadi penyangga utama bagi kehidupan sebagian besar masyarakat kota Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari paparan data pada tabel 2.4 bahwa sebanyak 39,20% penduduk kota Yogyakarta bekerja pada sektor perdagangan. Sektor perdagangan yang diusahakan oleh masyarakat Yogyakarta yakni perdagangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok yang berpusat di daerah Malioboro, dan Perdagangan barang-barang elektronik dan suku cadang kendaraan bermotor yang berpusat di daerah Jalan Brigjen Katamso. Perdagangan yang berhubungan dengan pariwisata juga menjadi penyangga utama dari kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta bahkan sektor perdagangan yang berhubungan dengan pariwisata ini lebih menjanjikan keuntungan yang lebih besar dari sektor perdagangan lain. Sektor perdagangan yang berhubungan dengan

⁸ Bernas, *Bentrok Antar Pendukung Parpol di Daerah K.H. Achmad Dahlan*. 2 Juni 1999, hlm. 1.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pariwisata antara lain; penjualan cendramata, batik dan makanan khas Yogyakarta.⁹

Sektor Industri juga merupakan jenis pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat kota Yogyakarta. Hal ini terbukti dari 26,74% masyarakat kota Yogyakarta bekerja di sektor industri. Industri yang banyak diusahakan oleh masyarakat kota Yogyakarta sebagian besar berhubungan dengan bidang pariwisata, seperti kerajinan tangan untuk sofenir, batik, industri mebel antik, perak serta industri makanan khas kota Yogyakarta.¹⁰

Masyarakat kota Yogyakarta yang bekerja di sektor jasa sebanyak 18,77%. Sektor jasa yang ditekuni oleh masyarakat Yogyakarta yakni sektor jasa yang berhubungan dengan status kota Yogyakarta sebagai kota pelajar yakni dengan mendirikan usaha kos-kosan, jasa foto copy, dan rental komputer. Usaha jasa lain yang menjadi penyangga kehidupan dari masyarakat kota Yogyakarta yakni usaha jasa transportasi, jasa keuangan dan jasa perhotelan. Perusahaan yang bergerak di sektor perhotelan yang ada di kota Yogyakarta dan menyerap tenaga kerja penduduk kota Yogyakarta, sebagian besar terletak di wilayah Kecamatan Gedongtengen.

Banyaknya jumlah hotel di daerah Kecamatan Gedongtengen karena letak wilayahnya berada di daerah sekitar Malioboro, yang menjadi pusat perekonomian DIY sekaligus sebagai daerah tujuan wisata, disamping itu daerah Kecamatan Gedongtengen letak wilayahnya dekat dengan Stasiun Tugu. Adapun jumlah hotel yang ada di wilayah Kecamatan Gedongtengen, berdasarkan dari

⁹ BPS Kota Yogyakarta, *op.cit.*, hlm. 36.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

data yang diperoleh Badan Statistik Kota Yogyakarta berjumlah 126, dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 840 orang.¹¹

Tabel 4.4

JUMLAH TENAGA KERJA MENURUT JENIS PEKERJAAN

Sektor / Lapangan Usaha	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja		Jumlah	Presentase (%)
		WNI	WNA		
1. Pertanian	2	26	-	26	0,095
2. Pertambangan	-	-	-	-	26
3. Industri	121	7.304	3	7.307	26,74
4. Listrik, Gas dan air	1	325	-	325	1,19
5. Bangunan	50	960	6	641	2,35
6. Perdagangan	354	10.771	-	10.711	39,20
7. Transportasi	29	956	-	956	3,50
8. Keuangan	49	2.232	-	2.232	8,17
9. Jasa	106	5.121	7	5.128	18,77
Jumlah	712	18.310	16	27.326	11,11

Yogyakarta dalam angka tahun 1999.¹²

Aneka ragam jenis pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat Kota Yogyakarta menyebabkan penyebaran perekonomian di Kota Yogyakarta kurang merata. Hal ini terjadi karena tidak meratanya kemampuan fisik dan mental serta sumber dana dari masyarakat Kota Yogyakarta. Faktor yang mendorong masyarakat Kota Yogyakarta untuk bekerja keras yakni adanya keinginan untuk meningkatkan jumlah penghasilan agar bisa hidup sejahtera.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 193

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pada tabel 4.5 tentang penyebaran bidang sosial ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta pada tahun 1999 kurang merata. Hal ini disebabkan karena keadaan fisik dan mental masyarakat Kota Yogyakarta untuk bekerja masih kurang dan dari pihak Pemda dinilai kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta, sehingga di wilayah Kota Yogyakarta masih terdapat pengusaha lemah, keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Keluarga Pra Sejahtera terbanyak berada di wilayah Kecamatan Pakualaman, yakni sebanyak 10,77%, sedangkan di wilayah Kecamatan Jetis sebanyak 8,73%. Wilayah Kecamatan Mantriweron sebanyak 6,18%, Kecamatan Kraton 4,71%, Kecamatan Mergangsan 0,35%, Kecamatan Umbulharjo 3,74%, dan di wilayah Kecamatan Kota Gede sebanyak 6,77%.

Proses pelaksanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemda wilayah Kota Yogyakarta yang menggunakan dana APBD, lebih lebih mengutamakan pada sektor perbaikan jalan, pembangunan gedung pemerintah, pembangunan sekolah-sekolah Negeri, pembangunan Puskesmas, pembangunan taman-taman kota, perbaikan tempat-tempat wisata, seperti perbaikan bangunan benteng peninggalan Kolonial Belanda dan perbaikan museum. Proses pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemda, yang lebih mengutamakan pada pembangunan sarana dan perbaikan fasilitas umum, mengakibatkan masyarakat yang kadaan ekonominya berada pada tingkat keluarga Pra Sejahtera merasa kurang mendapat perhatian dari pihak Pemda. Hal ini yang menyebabkan pada pelaksanaan pemilu tahun 1999, masyarakat yang berada pada taraf kehidupan

¹² *Ibid.*, hlm. 36.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

masyarakat pra sejahtera dan golongan ekonomi lemah lebih cenderung untuk memilih PDI Perjuangan, karena mereka berharap bahwa dengan kemenangan PDI Perjuangan pada pemilu 1999, kehidupan mereka akan lebih baik.

Tabel 4.5

**PENYEBARAN SUMBER DAYA EKONOMI BERDASARKAN
PADA JUMLAH KELUARGA MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN
PADA AKHIR TAHUN 1999**

Kecamatan	Pra Sejahtera		KS. I		KS. II		KS. III		KS. III Plus	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1. Mantrijeron	407	6,18	1.648	25,00	1.287	19,53	2.510	38,08	739	11,21
2. Kraton	233	4,71	1.336	27,00	593	11,98	2.374	47,98	412	8,33
3. Mergangsan	15	0,35	1.452	34,12	874	20,54	1.612	37,88	302	7,10
4. Umbulharjo	233	3,74	1.690	27,15	1.612	27,10	2.252	36,18	362	5,82
5. Kotagede	752	6,77	2.725	24,53	2.033	18,30	3.948	35,54	1.652	14,47
6. Gondokusuman	312	5,60	1.558	27,95	1.203	21,58	2.195	39,38	306	5,49
7. Danurejan	182	9,16	888	44,71	468	23,56	401	20,19	47	2,37
8. Pakualaman	346	10,77	1.711	53,24	757	23,55	332	10,33	68	2,12
9. Gondomanan	117	3,17	1.124	30,48	460	12,47	1.825	49,48	162	4,39
10. Ngampilan	178	4,41	1.943	48,11	455	11,27	1.320	32,68	143	3,54
11. Wirobrajan	106	2,72	1.397	35,40	624	16,02	1.569	40,27	218	5,60
12. Gedongtengen	436	5,83	2.040	27,29	647	8,65	3.574	47,81	779	10,42
13. Jetis	464	8,73	1.904	35,84	1.144	21,53	1.564	29,44	237	4,46
14. Tegalrejo	457	6,78	2.174	32,70	1.593	23,96	1.577	23,72	807	12,14
Jumlah	4.238	5,65	23.572	31,45	13.825	18,44	27.053	36,09	6.324	8,32
Tahun 1998	4.237	5,65	23.572	31,45	13.864	18,50	27.053	36,09	6.234	8,32
Tahun 1997	-	-	18.734	25,40	16.247	22,03	31.452	42,65	7.312	9,92

Sumber: Yogyakarta Dalam Angka Tahun 1999.¹¹

¹¹ BPS, *op-cit.*, hlm. 74

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan data pada tabel 4.5 tentang Penyebaran Sumber Daya Ekonomi, Berdasarkan Pada Jumlah Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan Pada Tahun 1999, menyebutkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta pada Tahun 1999, dapat dilihat dengan jelas bahwa untuk jumlah keluarga Pra Sejahtera paling banyak terdapat di daerah kecamatan Pakualaman yakni sebanyak 10,77 % dari jumlah kepala keluarga, sedangkan di tingkat Keluarga Sejahtera I paling banyak terdapat di daerah terdapat di daerah kecamatan Pakualaman yakni sebanyak 53,24 % dari jumlah Kepala Keluarga.¹²

Untuk Keluarga Sejahtera II, terbanyak di daerah kecamatan Tegalrejo yakni sebanyak 23,96% dari jumlah Kepala Keluarga. Sedangkan untuk Tingkat Keluarga Sejahtera III terbanyak terdapat di daerah Kecamatan Gondomanan, yakni sebanyak 49,48%. Dan untuk Tingkat Keluarga Sejahtera III Plus terbanyak terdapat di daerah kecamatan Kotagede, yakni sebanyak 14,87%.¹³

Wilayah Kecamatan Pakualaman yang letaknya lebih dekat dengan pusat pemerintahan Kota Yogyakarta, ternyata tidak bisa menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat di wilayah Kecamatan Pakualaman yang berada pada tingkat keliarga Pra Sejahtera. Banyaknya masyarakat Pakualaman yang berada pada tingkat keluarga Pra Sejahtera, karena jumlah lapangan kerja yang tersedia kurang mampu menampung jumlah tenaga kerja yang ada, dan kurangnya perhatian Pemda dalam hal penyediaan lapangan kerja.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sebaliknya di wilayah Kecamatan Mergangsan, yang merupakan salah satu pusat industri batik dan perdagangan, memiliki tingkat pemerataan perekonomian yang paling tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain di Wilayah Kota Yogyakarta. Hal ini dibuktikan oleh kondisi masyarakat Mergangsan yang merada pada tingkat keluarga Pra Sejahtera hanya 0,35%.¹⁴

Ketidak merataan sumber daya ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta menjelang pelaksanaan pemilu, mempengaruhi eksistensi perolehan suara partai Orde Baru. Kondisi Sosial ekonomi yang tidak merata di wilayah Kota Yogyakarta menjelang pelaksanaan pemilu 1999, dijadikan isu utama oleh parpol peserta pemilu dalam pengutaraan program-program partai, yakni tentang pengentasan kemiskinan. Masyarakat Kota Yogyakarta, terutama yang berada pada taraf kehidupan masyarakat Pra Sejahtera, dan Sejahtera satu, lebih tertarik pada program-program yang ditawarkan oleh PDI Perjuangan pada pelaksanaan kampanye, disamping itu mereka memilih PDI perjuangan pada pelaksanaan pemilu 1999, karena simpati terhadap perjalanan partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri pada masa pemerintahan Orde Baru.

Dari paparan data diatas mengenai penyebaran Sumber daya ekonomi yang ada di Kota Yogyakarta, berkaitan dengan hasil kemenangan PDI Perjuangan dalam pelaksanaan pemilu 1999 lalu, dapat disimpulkan bahwa para pendukung atau yang memberikan suara terbanyak pada PDI Perjuangan pada pelaksanaan pemilu 1999, adalah masyarakat yang sebagian besar berada pada tingkat kehidupan Pra sejahtera, K.S. I, dan K.S. II. Anggota masyarakat yang

¹⁴ *ibid.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berada pada tingkat kehidupan Pra Sejahtera, K.S. I dan K.S. II, selama masa pemerintahan Orde Baru merasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga dari waktu ke waktu kehidupan mereka tidak mengalami peningkatan, mereka berharap jika PDI Perjuangan menang dalam pelaksanaan pemilihan umum, taraf kehidupan mereka akan mengalami peningkatan.

V. Strategi Kampanye

Strategi kampanye oleh parpol peserta pemilu sangat diperlukan untuk memperoleh dukungan dalam pelaksanaan pemilu. Berbagai macam cara dilakukan oleh parpol peserta pemilu dalam pelaksanaan pemilu untuk menarik simpati dari masyarakat, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Pada pelaksanaan pemilu 1999, PDI Perjuangan menerapkan berbagai macam cara untuk menarik simpati dari warga masyarakat, antara lain:

1. Menjelang pelaksanaan pemilu, PDI Perjuangan mendirikan posko-posko gotong-royong yang merupakan hasil swadaya dari kader PDI Perjuangan di daerah-daerah strategis dan di sepanjang jalan di wilayah basis PDI Perjuangan.
2. Pada pelaksanaan kampanye PDI Perjuangan kota Yogyakarta, menampilkan juru bicara dari pengurus DPP PDI Perjuangan, sehingga dalam pelaksanaan kampanye tersebut, banyak anggota masyarakat yang ikut serta dalam setiap kegiatan kampanye.
3. Program-program partai yang dikemukakan oleh PDI Perjuangan pada pelaksanaan kampanye berupa penegakkan demokrasi, dan tentang ekonomi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kerakyatan, sehingga sangat menarik warga masyarakat untuk memilih PDI Perjuangan dalam pelaksanaan pemilu 1999.

4. Keberhasilan dari PDI Perjuangan mengidentikkan diri sebagai partai anak muda dan “partainya wong cilik”, sehingga banyak anggota masyarakat dari golongan ekonomi lemah yang memilih PDI Perjuangan.

VI. Figur Megawati Soekarnoputri

Figur Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI dan simbol perlawanan masyarakat pada masa pemerintahan Orde Baru begitu kuat, sehingga pada pelaksanaan pemilu 1999, banyak anggota masyarakat yang bersimpati pada Megawati Soekarnoputri dengan jalan memilih PDI Perjuangan pada pelaksanaan pemilu 1999.

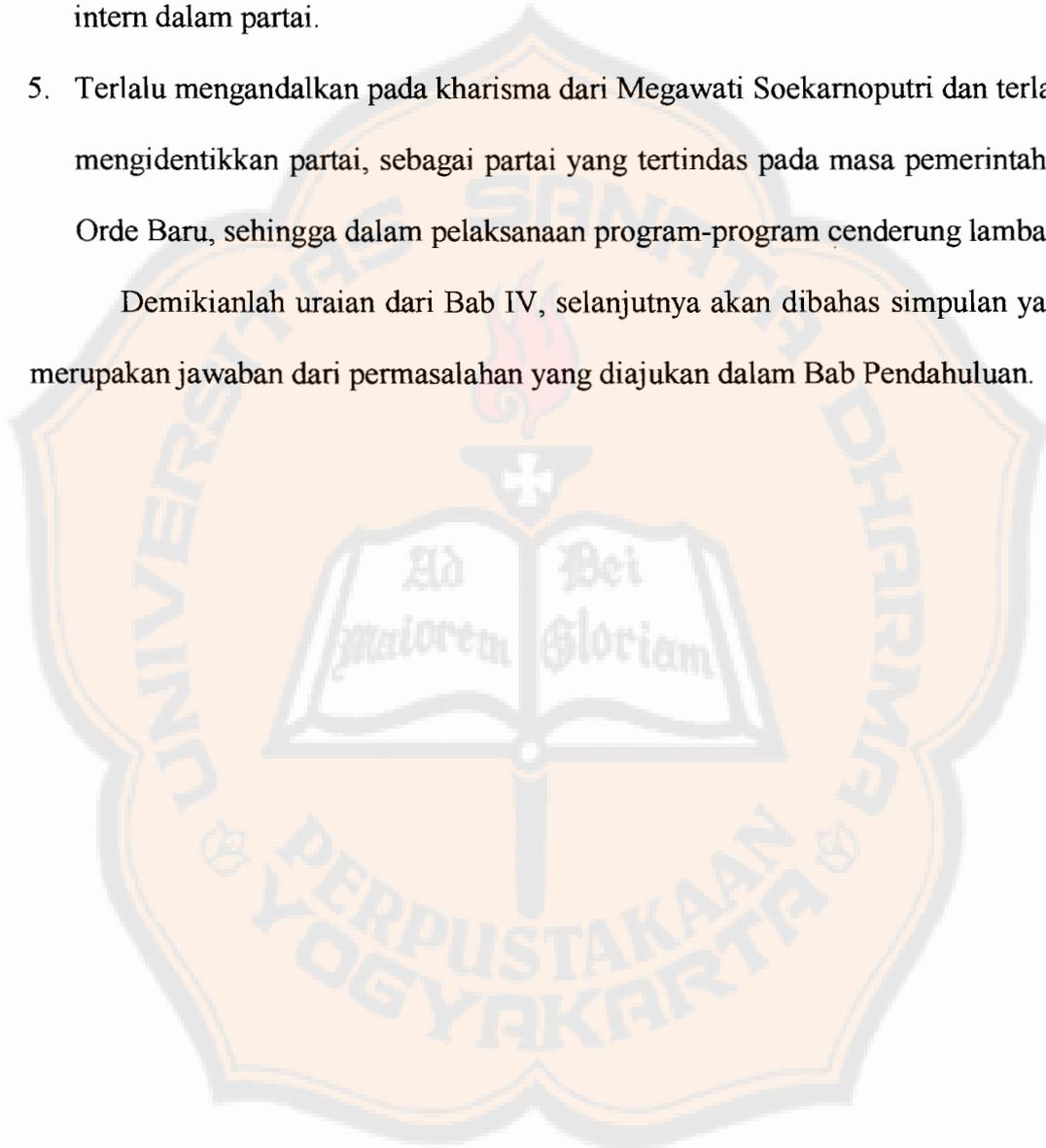
B. Faktor-faktor Yang Menghambat Kemenangan PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, dalam Pelaksanaan Pemilu 1999.

1. Banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum 1999, ternyata mengurangi dukungan masyarakat terhadap PDI Perjuangan dalam pelaksanaan pemilu 1999 lalu.
2. Kota Yogyakarta selain dikenal sebagai basis PDI Perjuangan juga merupakan basis dari PAN, hal ini tentu saja mengurangi jumlah perolehan suara yang diperoleh PDI Perjuangan dalam pelaksanaan pemilu 1999, ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa PDI Perjuangan mengalami kekalahan perolehan suara dari PAN di daerah Kotagede.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Lemahnya manajemen partai di tingkat DPC, PAC dan Ranting, karena kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas yang dimiliki oleh PDI Perjuangan di kota Yogyakarta.
4. Kurangnya pemahaman terhadap ADART, sehingga masih banyak masalah intern dalam partai.
5. Terlalu mengandalkan pada kharisma dari Megawati Soekarnoputri dan terlalu mengidentikkan partai, sebagai partai yang tertindas pada masa pemerintahan Orde Baru, sehingga dalam pelaksanaan program-program cenderung lamban.

Demikianlah uraian dari Bab IV, selanjutnya akan dibahas simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam Bab Pendahuluan.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V

SIMPULAN

PDI Perjuangan adalah partai politik yang terbentuk akibat adanya konflik intern dalam tubuh PDI pada masa pemerintahan Orde Baru, yang memuncak setelah pelaksanaan kongres Medan. Konflik yang terjadi dalam tubuh PDI, mengakibatkan terjadinya perpecahan dalam tubuh PDI menjadi dua kubu, yakni kubu PDI hasil kongres Medan pimpinan Suryadi dan PDI hasil MUNAS 1993, pimpinan Megawati Soekarnoputri. Semenjak pelaksanaan kongres Medan PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri dianggap sebagai partai yang ilegal. Pelaksanaan kongres Medan menurut beberapa pengamat politik merupakan hasil rekayasa dari pemerintah Orde Baru, yang merasa khawatir pada kekuatan PDI setelah Megawati menjadi ketua PDI pada tahun 1993, akan menyaingi kekuasaan pemerintah pada pelaksanaan pemilu 1997.

Setelah terjadi pergantian kekuasaan dari Soeharto ke B.J. Habibie PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri bisa melaksanakan kongres di Bali pada Tanggal 8 Oktober 1998. Pada pelaksanaan kongres tersebut, PDI pimpinan megawati melakukan pergantian nama partai menjadi PDI Perjuangan. Peresmian PDI Perjuangan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1999, oleh Megawati Soekarnoputri.

Setelah PDI Perjuangan di tingkat Pusat diresmikan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan, kemudian PDI Perjuangan Kota Yogyakarta melakukan peresmian

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

nama dan lambang dari PDI Perjuangan sekaligus melaksanakan sosialisasi nama dan lambang PDI Perjuangan pada anggota masyarakat pada tanggal 20 Februari 1999.

Pada pelaksanaan pemilihan umum 1999, beberapa upaya yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kota Yogyakarta untuk memenangkan pemilihan umum, berupa: pembentukan panitia pemenangan pemilu, pembentukan program kerja, kaderisasi, pendirian posko gotong-royang, pemasangan pamflet, umbul-umbul, bendera dan poster, pemilihan isu-isu yang akan dikemukakan pada pelaksanaan kampanye, pemilihan juru bicara kampanye dan pemilihan tempat kampanye. Usaha-usaha yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kota Yogyakarta pada pelaksanaan pemilihan umum 1999, ternyata berhasil memenangkan perolehan suara PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta sebesar 42,42% persen, dari 246.376 Orang peserta pemilu di Kota Yogyakarta.

Kemenangan PDI Perjuangan pada pelaksanaan pemilu 1999, didukung oleh beberapa faktor antara lain: keadaan geografis dan status kota Yogyakarta sebagai kota pelajar, keadaan sosial ekonomi masyarakat kota Yogyakarta, kondisi politik kota Yogyakarta, keadaan sosial ekonomi kota Yogyakarta, strategi kampanye, dan figur Megawati Soekarnoputri. Faktor penghambat kemenangan PDI Perjuangan di kota Yogyakarta, yakni: selain sebagai basis PDI Perjuangan, kota Yogyakarta juga dikenal sebagai basis PAN, lemahnya manajemen partai karena kurangnya SDM yang berkualitas, dan terlalu mengandalkan pada karisma Megawati Soekarnoputri dan selalu mengidentikkan diri sebagai partai yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tertindas pada masa pemerintahan Orde Baru, sehingga dalam setiap pelaksanaan program partai cenderung lamban.

Demikianlah uraian dari Penulisan skripsi ini semoga bermanfaat bagi para pecinta sejarah.





DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Dokumen Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kota Yogyakarta.

ADART PDI Perjuangan Kota Yogyakarta 1996-2000.

Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 1996-2000.

Dokumen Risalah Pelaksanaan Kongres Bali 8-10 Oktober 1998.

Dokumen PDI Perjuangan Tentang Evaluasi Hasil Akhir Tahun 1999 dan Prospeknya Memasuki Dasawarsa Abad 21.

Dokumen Kumpulan Pesan Harian Ketua Umum DPP PDI Perjuangan 1993-1998.

Dokumen Risalah Kongres Semarang 2000.

Dokumen hasil rapat PDI tanggal 4 Juli 1996.

Dokumen Surat Keputusan DPP PDI Tanggal 5 Juli 1996.

Dokumen hasil rapat PDI tanggal 5 Agustus 1996.

Buku

Ahmad Bahar, *Biografi Politik Megawati Soekarnoputri 1993-1996*. Yogyakarta: PT Pena Cendekia, 1996.

Arbi Sanit, *Reformasi Politik Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 1998.

BPS, *Kota Yogyakarta dalam Angka Tahun 1999*. BPS Kota Yogyakarta, 2000.

Eep Syaifullah Fatah, *Bangsa Saya Yang Menyebalkan*, Bandung: PT Roosdakarya Remaja, 1998.

Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi, Strategi dan Program*. Jakarta: PT Gramedia 1999.

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yayasan Benteng Budaya 1995.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Megawati Soekarnoputri, *Pokok-Pokok Pikiran Megawati Soekarnoputri, Bendera Sudah Saya Kibarkan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia, 1977.

Miriam Budiarto, *Partisipasi dan Parpol*. Jakarta: PT Gramedia, 1982.

Riswanda Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar Offset.

Redaksi Sinar Grafika, *Tiga Undang-Undang Politik 1999*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 1999.

Rusli Karim, M., *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Sudirman Ahmadi, *Lima Tahun Komnas HAM Catatan Wartawan*. Jakarta: Forum Akal Sehat, 1999.

Sudibjo, M., *Pemilihan Umum 1992 Suatu Evaluasi*. CSIS, 1995.

Suprianto Ari Widodo, *Proposal Penelitian Kemenangan Suara PDI Perjuangan dalam Pemilu 1999*. Yogyakarta: APMD, 1999.

Veven Wardana, *Kemelum PDI di Layar Televisi*. Jakarta: Forum Studi Arus Informasi, 1997.

Majalah

Adil, 8 April 1998, 29 April 1998.

Tempo, 25 Desember 1998.

Gatra, 14 September 1998.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Daftar Informan

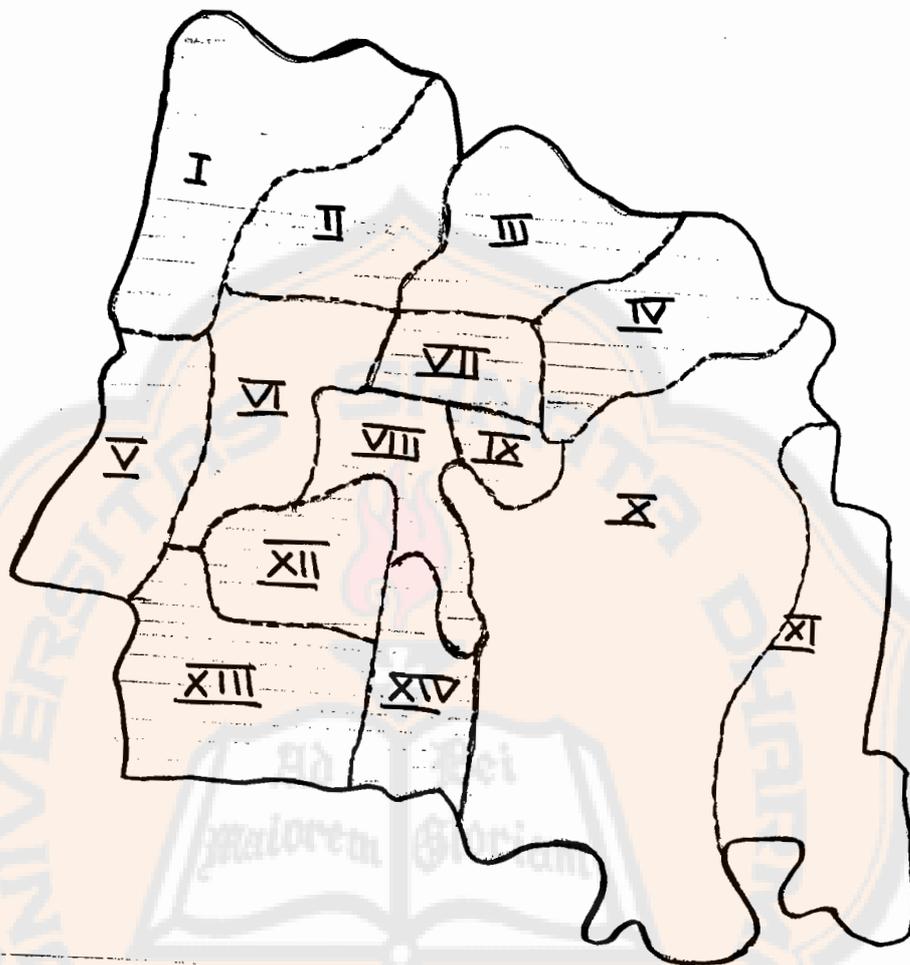
no	nama	Jenis kelamin		Umur	Pekerjaan	alamat	Keterangan
		L	P				
1.	Bahtanisar Basyir, SE.	-		40	Ketua DPRD II Kota Yogyakarta.	Mijilan	Sekretaris PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.
2.	TH. Sumardjono	-		47	Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRDII Kota Yogyakarta.	Umbulharjo	Ketua Umum PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.
3.	Winasis	-		50	Wiraswasta	JL. Mataram	Ketua PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.
4.	Nuryadi	-		45	Anggota DPRD II Fraksi PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.	Gondokusuman	Ketua PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.
5.	Widi Praptomo	-		34	Mahasiswa/wiraswasta.	Gondokusuman	Sekretaris PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.
6.	Catur Gono	-		37	Anggota DPRD II Fraksi PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.	Umbulharjo	Ketua PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.
7.	Gunarto, SE.			25	Mahasiswa.		Kader PDI Perjuangan
8.	Paryadi Pamungkas	-		40	Mantan anggota DPRD II Bantul, Fraksi PDI, dan Caleg Anggota DPRD II Bantul PDI Suryadi.	Ngijo, Bantul	-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



LAMPIRAN

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
PETA POLITIK KOTA YOGYAKARTA



keterangan:

--- Batas wilayah kecamatan

□ Basis PDI Perbatasan

I : Tegalsrejo

II jetis

III Condokumayan

IV Gedongtengen

V Wirobrajan

VI Ngampilan

VII Danarejan

VIII Gandomanan

IX Pakualaman

X Umbulharjo

XI Kotagede

XII Kraton

XIII Mantriweron

XIV Mergangsan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PERTANYAAN

- A. Persiapan dan Pelaksanaan Pemilu 1999 di Kotamadya Yogyakarta (daftar pertanyaan untuk Sospol Kotamadya Yogyakarta).
1. Bagaimana jalannya pembentukan Panitia Pemilu 1999 di Kotamadya Yogyakarta?
 2. Bagaimana cara pengaturan jadwal kampanye dalam Pemilu tahun 1999 di Kotamadya Yogyakarta? (minta salinan jadwal kampanye 1999)
 3. Bagaimana Pelaksanaan Kampanye di Kotamadya Yogyakarta?
 4. Kendala apa saja yang dihadapi selama pelaksanaan kampanye di Kotamadya Yogyakarta?
 5. Topik-topik apa saja yang biasanya disampaikan oleh tokoh-tokoh Partai selama pelaksanaan Kampanye?
 6. Bagaimana jalannya proses pelaksanaan Pemilu dan penghitungan suara 1999 di Kotamadya Yogyakarta?
 7. Hambatan apa yang dihadapi selama pelaksanaan pemilu dan proses penghitungan suara?
 8. Bagaimana hasil perolehan suara dalam pemilu tahun 1999 ? (minta daftar salinan perolehan suara perkecamatan).
 9. Bagaimana cara penetapan nama-nama calon anggota Legislatif?
 10. Dasar-dasar apa yang digunakan dalam penetapan dan pengangkatan anggota Legislatif di wilayah Kotamadya Yogyakarta?
- B. Terbentuknya PDI P di Kotamadya Yogyakarta:
1. Kapan nama PDI P mulai digunakan secara resmi?
 2. Apa makna dari lambang PDI P?
 3. Bagaimana proses terbentuknya PDI P di tingkat pusat?
 4. Bagaimana Proses terbentuknya PDI P di Kotamadya Yogyakarta?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam pendirian PDI P di Kotamadya Yogyakarta?
6. Bagaimana proses dan cara pemilihan pengurus PDI P di Kotamadya Yogyakarta?
7. Bagaimana proses pemilihan ketua PAC dan pengurus PDI P di Kotamadya Yogyakarta ?

C. Kedudukan PDI P di Kotamadya Yogyakarta dalam pemilu 1999 dalam hal:

◆ Persiapan PDI P dalam menghadapi pemilu:

1. Persiapa-persiapan apa saja yang dilakukan oleh PDI P dalam menghadapi pemilu 1999? Baik persiapan teknis maupun non teknis.
2. Bagaimana proses dan cara PDI P dalam penggalangan kader?
3. Strategi apa yang diterapkan PDI P dalam menghadapi pemilu?
4. Siapa saja tokoh-tokoh yang akan diterjunkan dalam kampanye?
5. Topik-topik apa saja yang disampaikan oleh tokoh-tokoh PDI P dalam orasi kampanye?

◆ Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat proses pelaksanaan Kampanye PDI P di Kotamadya Yogyakarta?

◆ Berapa Hasil perolehan suara PDI P di Kotamadya Yogyakarta dalam pemilu tahun 1999?

D. Dari segi apa saja dampak yang ditimbulkan oleh kemenangan PDI P dalam pemilu tahun 1999 bagi perkembangan kehidupan demokrasi di Kotamadya Yogyakarta?

E. Sejauh mana dapat dikatakan pemilu tahun 1999 adalah kemenangan bagi PDI P?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



Statistik

1. Kondisi sosio geografis.
 - a. Bagaimana letak Kotamadya Yogyakarta dan berapa luas wilayahnya?
 - b. Bagaimana keadaan iklim di Kotamadya Yogyakarta?
 - c. Bagaimana keadaan Topografi Kotamadya Yogyakarta?
2. Bagaimana kondisi sosial Kotamadya Yogyakarta tahun 1999?
 - a. Berapa Jumlah Penduduk?
 - b. Berapa Jumlah mutasi penduduk tahun 1999?
3. Bagaimana pembagian tenaga kerja di Kotamadya Yogyakarta menurut jenis pekerjaan?
4. Bagaimana penyebaran Sumber daya Ekonomi masyarakat Yogyakarta?
5. Bagaimana Kondisi budaya Kotamadya YK? (banyaknya perkumpulan kesenian tahun 1999).
6. Berapa Jumlah organisasi politik dan kepemudaan di YK?
7. Berapa jumlah sarana pendidikan di kota YK /per kecamatan th 99
8. Berapa jml sarana kesehatan di kota YK /per kecamatan th 99